

**IMPLEMENTASI PROGRAM “MAKASSARTA’ TIDAK
RANTASA“ DI GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH
MAKASSAR : ANALISIS GENDER**

*THE IMPLEMENTATION OF “MAKASSARTA’ TIDAK
RANTASA” PROGRAM IN GPIB BAHTERA KASIH
CONGREGATION OF MAKASSAR: A GENDER ANALYSIS*

SANTI YOHANIS



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019



**IMPLEMENTASI PROGRAM “MAKASSARTA’ TIDAK
RANTASA” DI GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH
MAKASSAR: ANALISIS GENDER**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Gender dan Pembangunan

Disusun dan diajukan oleh

SANTI YOHANIS

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDIN

MAKASSAR

2019



TESIS

**IMPLEMENTASI PROGRAM "MAKASSARTA' TIDAK RANTASA"
DI GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH MAKASSAR:
ANALISIS GENDER**

Disusun dan diajukan oleh

**SANTI YOHANIS
P2000216003**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 2 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, M.S.
Ketua



Dr. Ery Iswari, M.Hum.
Anggota

Ketua Program Studi
Gender dan Pembangunan,



Ethrawaty Fahcry, M.S.

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Yohanis

Nomor Mahasiswa : P2000216003

Program Studi : Gender Dan Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Januari 2019

Yang menyatakan

Santi Yohanis



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “Implementasi Program ‘Makassarta’ Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar : Analisis Gender” ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Humaniora dalam bidang Gender dan Pembangunan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penyusunan tesis ini bertolak dari hasil pengamatan penulis pada fenomena kesenjangan gender yang terjadi dalam implementasi program “Makassar’ta Tidak Rantasa” yakni Kerja Bakti Rutin di GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Fenomena tersebut memengaruhi kehadiran dan partisipasi warga jemaat yang tidak optimal dalam kegiatan Kerja Bakti, bahkan banyak kali didominasi oleh kaum perempuan dan kaum lanjut usia. Dengan demikian melalui tesis ini penulis bermaksud memberikan sumbangan berupa alternatif strategis dalam mengimplementasikan kebijakan atau program serta menetapkan program yang responsif gender.

Dalam penulisan tesis ini penulis menemui banyak kendala, tetapi sebagai orang beriman penulis menyadari bahwa berkat doa dari orang-orang terdekat dan dengan semangat yang kuat serta dukungan dari pihak-pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari



bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan yang semuanya berada dalam diri penulis. Namun, apa pun hasilnya karya ini merupakan perwujudan semangat, kemampuan, dan kerja keras penulis pada saat ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, M.Si., selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. Ery Iswari, M.Hum., anggota komisi pembimbing atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sama penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Mardiana Ethrawaty Fachry, M.S., selaku Ketua Prodi Gender dan Pembangunan sekaligus anggota tim penguji yang telah memberikan bantuan dan saran-saran demi kesempurnaan tesis ini. Demikian pula ucapan terima kasih penulis kepada Dr. Ir. Novaty Eny Dunga, M.P. dan Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., selaku anggota tim penguji yang juga telah memberikan petunjuk dan masukan dalam perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di sekolah ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Bahtera Kasih Makassar yang

memberikan banyak bantuan, baik selama studi maupun pada saat penyelesaian tesis ini.



Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih kepada suami tercinta Agussalim Waangsir, S.S.,M.Hum. dan kedua anakda Adelia Ekarle Waangsir dan Artih Nuraniah Waangsir yang telah banyak berkorban dan dengan setia mendampingi penulis selama ini.

Teristimewa pula, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua ibunda Sonya Bombokang dan ayahanda Bonifasius Yohanis (almarhum) yang telah melahirkan, membesarkan, dan telah banyak berkorban untuk membangun masa depan anak-anaknya. Demikian pula kepada kedua adikku, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberkati kita semua dan penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi penulis, khususnya dan pembaca umumnya.

Makassar, 7 Januari 2019

Santi Yohanis



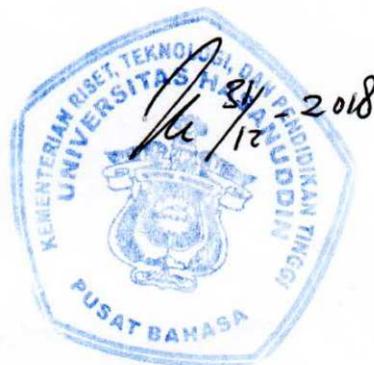
ABSTRAK

SANTI YOHANIS. *Implementasi Program “Makassarta’ Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar: Analisis Gender* (dibimbing oleh Hazairin Zubair dan Ery Iswary).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi program “Makassarta’ Tidak Rantasa”, mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program “MTR”, dan menganalisis kesenjangan gender dalam program implementasi Program “Makassarta’ Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (BPIB) Jemaat Bahtera Kasih, Makassar telah menerapkan Program “Makassarta’ Tidak Rantasa” melalui kegiatan penghijauan, khususnya kerja bakti rutin. Implementasi program kerja bakti sudah berlangsung dengan baik berkat keikutsertaan para pelayan yang potensial, baik pelaksana maupun warga jemaat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan yang memengaruhi keterlibatan jemaat dalam kegiatan kerja bakti akibat faktor birokrasi, yaitu koordinasi dan pembagian tugas antarpelaksana yang belum optimal, dan kesenjangan gender masih saja terjadi karena ada warga jemaat yang menganggap bahwa urusan kebersihan gereja adalah urusan kaum perempuan atau ibu-ibu, sehingga kehadiran warga jemaat dalam kerja bakti masih didominasi oleh kaum perempuan dan unsur kategorial tertetu, yaitu Pelkat Kaum Perempuan dan Pelkat Lanjut Usia (Lansia).



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

SANTI YOHANIS. *The Implementation of "Makassarata' Tidak Rantasa" Program in GPIB Bahtera Kasih Congregation of Makassar: A Gender Analysis (supervised by Hazairin Zubair and Ery Iswary)*

The aims of this research are to explain the implementation of "Makassarata' Tidak Rantasa" (our Makassar is not dirty) program, describe the factors affecting the implementation of "Makassarata' Tidak Rantasa" (MTR) program, and analyse gender gap in the implementation of MTR in GPIB Bahtera Kasih Congregation, Makassar.

This research used qualitative method with descriptive approach. The data were obtained through observation, interview, literature study, and documentation.

The results of the research indicate that the Protestant Church in Western Indonesia (GPIB) Bahtera Kasih Congregation of Makassar has implemented MTR program through reforestation activities, especially routine community services. The implementation of routine community service program has run well because of potential servants, i.e. both executors and congregation members. However, in its implementation, there are still deficiencies that affect the involvement of congregation in voluntary community service activities due to bureaucratic factors, i.e. coordination and division of tasks among implementers are not optimal, and there are still gender gap. This is because there are members of congregation who think that cleaning the church is a matter for women or mothers. Therefore, the participation of congregation members in community service is still dominated by women and certain categorial elements, i.e. *Pelkat Kaum Perempuan* (Women Pelkat) and *Pelkat Lansia* (Elderly Perkat).

Key words: the implementation of "Makassarata' Tidak Rantasa", gender gap, community service



Optimization Software:
www.balesio.com



DAFTAR ISI

HALAMAN

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iv
Prakata.....	v
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik	10
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	18
C. Kasus “Makassarta’ Tidak Rantasa”	24



D. Pembagian Peran Gender	28
E. Analisis Gender	31
F. Kebijakan Responsif Gender	35
G. Sekilas Tentang GPIB	37
H. Hasil Penelitian Terdahulu	51
I. Kerangka Pikir	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
a. Observasi	62
b. Wawancara	63
c. Studi Literatur	63
d. Dokumentasi	63
E. Defenisi Operasional	64
F. Teknik Analisis Data	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum GPIB Jemaat Bahtera Kasih.....	69
B. Implementasi Program Kerja Bakti di GPIB Jemaat Bahtera Kasih.....	79
a. Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Program Kerja Bakti.....	86



D.Analisis Kesenjangan Gender pada Implementasi Program Kerja Bakti.....	98
---	----

BAB V PENUTUP

A.Simpulan.....	111
-----------------	-----

B.Saran.....	113
--------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1. Jenis dan Sumber Data Primer	61
3.2. Jenis dan Sumber Data Sekunder	62
4.1. Jenis Kegiatan di Lingkungan Gereja	72
4.2. Data Jumlah Warga Jemaat Sekpel. IV	76
4.3. Data Jumlah Warga Jemaat Sekpel VII	78
4.4. Data Jumlah Warga Jemaat Sekpel XI	79
4.5. Data Kehadiran Jemaat Sekpel IV, VII dan XI Dalam Kerja Bakti Rutin	86
4.6. Gender Analisis Pathway GPIB Jemaat Bahtera Kasih	107



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1. Faktor-Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III.	18
2.2. Kerangka Pikir	56
3.1. Analisis Data Model Interaktif	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara
2. Surat Izin Permintaan Penelitian
3. Program Kerja dan Anggaran Belanja Tahun Pelayanan 2018 – 2019
4. Foto Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan fakta yang dihadapi sebagian besar masyarakat kota besar di Indonesia. Karena itu, masalah sampah bukan lagi menjadi masalah lokal tetapi sudah menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Dapat dikatakan pada satu sisi masalah sampah tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari kehidupan dan hasil kegiatan masyarakat, namun pada sisi lain jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius yang dapat merusak atau mencemarkan lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Beberapa masalah yang timbul akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik antara lain, dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga atau binatang penyebar penyakit yang dapat menyebabkan

menular (seperti diare, kolera, tifus), pencemaran udara (seperti k sedap, debu gas-gas beracun, dan asap pembakaran), dan



pencemaran air (seperti perubahan warna dan bau air sungai), bahkan sampah yang tertimbun bukan pada tempatnya, khususnya di selokan atau drainase dapat mengakibatkan banjir (Hutabarat dkk, 2015).

Selain beberapa masalah diatas, persoalan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan persoalan besar seperti yang pernah terjadi di Indonesia yakni melalui tragedi ledakan dan longsor TPA Leuwigajah, Jawa Barat pada tanggal 21 Pebruari 2005. Peristiwa tersebut menewaskan sekitar 157 orang serta kerugian harta benda. Nugroho, (2017:112), menyatakan bahwa tragedi itu diawali dengan curah hujan deras semalaman suntuk dan terpicu konsentrasi gas metan yang terdapat dalam tumpukan sampah. Metana (CH₄) adalah gas utama yang dihasilkan oleh pembusukan bakteri limbah di TPA dan dapat menimbulkan ledakan serta kebakaran pada TPA jika berada di udara dengan konsentrasi 5-15% (NIST dalam Andhika dan Agung, 2016).

Berbagai masalah disekitar sampah yang terjadi di Indonesia terutama melalui tragedi Leuwigajah mendorong pemerintah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Karena itu, HPSN merupakan peringatan tragedi longsornya tumpukan sampah di TPA Leuwigajah pada tanggal 21 Februari 2005, (Kompas.com, 21 Februari dalam Aditya Nugroho, 2017). Dengan demikian, diharapkan melalui peringatan tersebut masyarakat Indonesia

pat menjaga lingkungan dari dampak negatif sampah agar tidak mi kembali tragedi yang sama. Sebab tidak dapat dipungkiri



bahwa sampah akan berdampak negatif bila tidak disikapi dan dikelola dengan baik. Sebaliknya bila ditangani dan dikelola dengan baik justru dapat memberi nilai jual / berdampak positif. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah baik pusat maupun daerah dengan seluruh komponen terkait dalam mengurangi dan menangani sampah (UU No.18 Tahun 2008).

Pemerintah Kota Makassar menjadikan permasalahan sampah sebagai masalah yang serius, mengingat kota Makassar yang semakin padat penduduknya, semakin besar pula kemungkinan menghasilkan sampah. Per Januari 2017 volume sampah di TPA Tamangapa Antang Makassar sebesar 1.200 ton, lebih sedikit jika dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya, sebesar 1.250 ton, (Berita Kota Makassar dalam Alamsyah dkk, 2017).

Realita ini menjadi tantangan tersendiri bagi kota Makassar, mengingat kota Makassar sudah dikenal sebagai kota Daeng, Kota Anging Mammiri, Kota Dunia, Centre Poin Of Indonesia, dan julukan yang paling menarik adalah Makassarta' Tidak Rantasa (MTR). Kata Rantasa sendiri dalam bahasa Makassar yang memiliki arti 'kotor atau jorok'. Kotor atau jorok, sering dikaitkan dengan masalah kebersihan lingkungan. Tidak rantasa itu sendiri memiliki arti tidak kotor atau jorok. Sehingga kata Tidak Rantasa menarik perhatian untuk ditindaklanjuti dalam julukan

arta' Tidak Rantasa yang hingga kini menjadi program kerja
tah Kota Makassar.



Untuk mencapai program yang dirancang oleh Walikota tersebut berbagai kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kata tidak rantasa. Dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan yang dianggap mampu mengatasi masalah persampahan kota, antara lain melalui gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) yang menjadi salah satu jargon kebijakan “MTR”. Gerakan LISA adalah kebijakan dari Walikota Makassar yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan kota Makassar (Hardianti dkk,2017). Selain itu Pemerintah Kota Makassar juga telah membuat kegiatan baik ditingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW, yaitu Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi Gerakan “Makassar’ta Tidak Rantasa” (GEMAR MTR) dan Sampah Tukar Beras.

Nur (2015), menyatakan bahwa dalam desain Gerakan “MTR”, keterlibatan elemen-elemen pendukung yakni Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat/ Kepemudaan dan masyarakat itu sendiri merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Gereja adalah salah satu lembaga keagamaan / organisasi masyarakat yang hadir ditengah masyarakat yang juga mempunyai misi membawa damai sejahtera ketengah dunia termasuk menjaga dan memelihara alam semesta atau lingkungan di sekitarnya. Hal in sebagaimana yang tertuang dalam teks Alkitab khususnya pada kitab

1 ayat 28 berbunyi :



“ Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka : “Beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takhlukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap dibumi.”

Teks ini menegaskan bahwa Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai ciptaan termulia termasuk gereja untuk hidup bersama dengan makhluk ciptaan lain di bumi dalam keharmonisan. Dalam hal ini manusia atau gereja bertanggung-jawab untuk menjaga dan memelihara serta melestarikan bumi dan segala isinya. Dengan kata lain, manusia tidak hanya diperintahkan untuk menjalin relasi yang baik dengan sang Pencipta dan sesamanya tetapi juga terhadap makhluk ciptaanNya yang lain.

Terkait dengan hal diatas, tak heran jika isu tentang lingkungan hidup juga menjadi salah satu pokok pembahasan penting dalam persidangan gereja-gereja, baik internasional maupun nasional dan lokal. Misalnya, Isu keadilan lingkungan menjadi salah satu dari dua belas isu global yang ditetapkan pada sidang gereja-gereja sedunia (DGD) X yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober-8 November 2013 di Busan, Korea Selatan. Sementara Isu Kerusakan Lingkungan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Persidangan Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang dilaksanakan di Kupang menghasilkan pencaanangan apa yang disebut “Gereja Sahabat

Maksudnya, gereja mestinya memberi contoh dan teladan na bersikap ramah terhadap alam (Ngelow, dkk., 2015).



Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) sebagaimana gereja-gereja lain di dunia dan di Indonesia juga menaruh perhatian serius terhadap masalah lingkungan dan menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam persidangan-persidangan gereja, antara lain melalui Persidangan Sinode GPIB XVIII / 2005 yang menghasilkan rumusan Visi dan Misi GPIB (2006-2026). Majelis Sinode GPIB (2015), menguraikan isi Visi dan Misi GPIB 2006-2026, antara lain :

“ Visi : GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan-Nya”

“ Misi : 3) Menjadi Gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan dan semangat persatuan dan kesatuan warga Gereja sebagai warga masyarakat .“

Bertolak dari Visi dan Misi GPIB inilah, seluruh Jemaat GPIB yang berjumlah sekitar 323 Jemaat dan tersebar di 26 propinsi di tanah air, melaksanakan pelayanannya melalui program-program yang ditetapkan di masing-masing Jemaat yang disesuaikan kondisi setempat.

Gereja Protestan Indonesia di Bagian Barat (GPIB) Jemaat Bahtera Kasih secara geografis berada di Jalan Tidung X No. 18 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini Makassar. Sebagai bagian dari gereja-gereja didunia dan Indonesia, GPIB Jemaat Bahtera Kasih bersama seluruh anggota Jemaat GPIB lainnya di Indonesia dan di wilayah Sulselbara khususnya, juga menjadikan Isu Lingkungan dalam

skan program kerjanya. Hal ini tampak dengan memasukkan

“MTR” khususnya Program “Pemeliharaan Penghijauan dan Kerja Bakti Rutin” serta “Kerja Bakti Rutin” sebagai



bagian dari program kerja jemaat, tidak lama setelah Pemerintah mencanangkan program tersebut pada tahun 2014. Tepatnya sejak tahun 2016 hingga saat ini, yakni melalui Program Kerja Tahun 2018-2019, (Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih, 2018).

Realita diatas menunjukkan pada satu sisi GPIB Jemaat Bahtera kasih Makassar terpanggil mengemban amanat Allah dalam memelihara lingkungan dengan menjadikan isu lingkungan sebagai masalah yang serius, pada sisi lain memberikan respon terhadap program Pemerintah kota Makassar.

Gayung bersambut, segala upaya/ kerja keras GPIB Jemaat Bahtera Kasih mendapat respon dari pemerintah khususnya Pemerintah setempat di Kelurahan Mappala dan Kecamatan Rappocini yang memercayakan GPIB Jemaat Bahtera Kasih (setelah melalui berbagai penilaian) sebagai utusan mengikuti lomba kebersihan lingkungan. Pada tahun 2016 Paud Tunas Kasih dipercayakan sebagai utusan mewakili Kelurahan Mappala mengikuti lomba kebersihan lingkungan antar Paud di wilayah Kecamatan Rappocini dan berhasil meraih juara I. Kemudian pada tahun 2017 GPIB Jemaat Bahtera Kasih mewakili Kecamatan Rappocini mengikuti lomba kebersihan lingkungan antar gereja Se-Kota Makassar dan meraih juara II.

Fenomena tersebut seyogyanya semakin memberikan semangat bagi seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih dalam memelihara dan

kebersihan lingkungan khususnya Lingkungan gereja, termasuk menyukseskan Program Kerja Bakti Rutin. Realita menunjukkan



bahwa kehadiran warga jemaat dalam kegiatan kerja bakti rutin kurang optimal dan didominasi oleh kaum perempuan atau pelayanan kategorial tertentu seperti Pelayanan Kategorial Perempuan dan Pelayanan Kategorial Lanjut Usia. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengapa fenomena ini terjadi melalui penelitian yang berjudul: **Implementasi Program “Makassar’ta Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar: Analisis Gender”**.

Adapun untuk menjawab fenomena diatas, maka penulis menggunakan teori Implementasi model Edwards III yang dipadukan dengan analisis gender Pathway atau Gender Analysis Pathway.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Program “Makassar’ta Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar?
2. Apakah Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Program “Makassarta’ Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar?
3. Bagaimana kesenjangan gender dalam implementasi program “Makassarta’ Tidak Rantasa“ di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar ?



B. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan implementasi program “Makassar’ta Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Program “Makassar’ta Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar.
3. Menganalisis kesenjangan gender dalam implementasi program “Makassar’ta Tidak Rantasa” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat akademis adalah untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dalam melihat implikasi program “Makassarta’ Tidak Rantasa” yang responsif gender
2. Manfaat praktis adalah untuk memberikan informasi mengenai Implementasi Program “Makassarta’ Tidak Rantasa” yang responsif gender pada GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dan rekomendasi dalam membuat dan menetapkan program atau kegiatan yang lebih responsif gender.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), kata *kebijakan* berasal dari kata *bijak* yang berarti “pandai atau pandai menggunakan akal budi”, sedangkan kata *kebijakan* berarti ‘kepandaian atau kemahiran’. Sementara itu, kata *publik* artinya ‘umum’ atau ‘orang banyak’.

Terdapat banyak ragam pendapat tentang pengertian kebijakan publik. Antara lain, Thomas R. Dye dalam Nurhaeni (2009), menyatakan “*publik policy is whatever governments choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Defenisi tersebut bermakna bahwa; 1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; 2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan pemerintah. Contohnya adalah keputusan pemerintah untuk menaikkan harga elpiji meskipun masyarakat terbelit kemiskinan.

Wisakti (2008), menyatakan bahwa George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “..is what government say to do or not to

goals or pupuses of governernment program..”(...adalah apa nyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,



kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah..).

Anderson dalam Nurhaeni (2009), menyatakan tentang kebijakan publik, "*public policy is purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan).

Beberapa pendapat menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dibuat seorang aktor atau sejumlah aktor pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik. Dalam hal ini kebijakan publik harus dirancang untuk mengatasi masalah publik dan dilakukan berdasarkan nilai-nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan adanya kesejahteraan masyarakat atau segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to implement*" yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan mengingat tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan

dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang



meliputi upaya mengelola input, implementasi baru akan dimulai apabila tujuan, sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk diproses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Metter dan Horn dalam Wisakti (2008), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Wahab dalam Handari (2012), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Pendapat lain tentang implementasi kebijakan dikemukakan oleh MasManian dan Sebatier, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Edward III, Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Menurut Abdullah (1988: 398), bahwa pengertian dan unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut :

1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut

terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang teknis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu



program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

2. Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “outcomes” unsur-unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu :
 - a. Implementasi program atau kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan pada umumnya.
 - b. Target *groups*, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
 - c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.
 - d. Unsur pelaksana atau implementor, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Dalam implementasinya, kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah beberapa model implementasi kebijakan berdasarkan berdasarkan pandangan dari

a tokoh yakni:



1. **Model Edward III** (Subarsono 2013:90), Implementasi dipengaruhi oleh empat variabel yaitu

a. Faktor Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal itu penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

b. Faktor Sumber Daya

Tampa sumber daya yang memadai, tentu implmentasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Faktor Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti: kejujuran dan komitmen. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, sebagaimana diharapkan oleh pembuat kebijakan.



d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah standard *operasional procedure* (SOP) sebagai pedoman bagi setiap implementasi kebijakan.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013: 99), terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap para pelaksana.

Selanjutnya variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut dijelaskan secara rinci oleh Subarsono, (2013: 99), adalah sebagai berikut:

- a. **Standar dan sasaran kebijakan.** Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya



non manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

- c. **Hubungan antar organisasi.** Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. **Karakteristik agen pelaksana,** yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. **Kondisi sosial, politik dan ekonomi.** Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. **Disposisi implementor.** Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Kebijakan sejauh mana kelompok-



kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan.

3. Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013: 93), terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*contents of policy*) dan lingkungan implementasi (*context implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sementara itu, variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dari beberapa model yang telah dijelaskan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa setiap model yang dikemukakan para ahli, memiliki fokus yang hampir sama. Namun, dalam setiap model dari

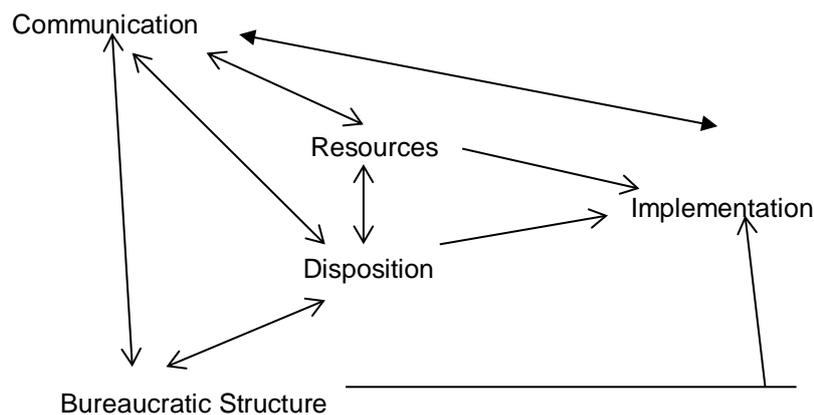
ada terdapat beberapa faktor yang menonjol bahkan tidak sama dengan model lain. Hal ini dikarenakan setiap model implementasi



memiliki indikator tersendiri sesuai dengan lingkungan tempat kebijakan itu diimplementasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model implementasi Edwards III karena model ini sesuai dengan fokus dari peneliti dengan judul “ Implementasi Program “MTR” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar “: Analisis Gender”.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi kebijakan Publik

Menurut George Edwards III (Subarsono 2013: 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 2.1 Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Edwards

Sumber: Edwards III dalam Subarsono (2013:91)

1. Komunikasi



ratmo dkk dalam Wisakti (2008), menyatakan bahwa komunikasi proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya.

Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Kemudian Cangara dalam Wisakti(2008), menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi, demi menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku.

George C. Edward sebagaimana dikutip oleh Winarno dalam Wisakti (2008), menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity).

Kata transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengiriman (penerusan) pesan dsb dari seseorang kepada orang (benda) lain. Transmisi merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum mengimplementasikan suatu keputusan pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi antara lain pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan serta informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

Faktor kedua adalah kejelasan. Petunjuk-petunjuk pelaksana tidak

harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut juga harus jelas ketika kebijakan-kebijakan



diimplementasikan sebagaimana mestinya. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya penafsiran yang salah bahkan bertentangan dengan makna pesan awal.

Faktor ketiga adalah konsistensi yang berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak (KBBI). Implementasi kebijakan akan berlangsung efektif jika perintah-perintah pelaksanaan konsisten dan jelas. Sebab walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan memiliki unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dikaitkan dengan penelitian implementasi program “MTR” ini, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah :

- a. Penyampaian dan kejelasan pesan
- b. Penggunaan Media

2. Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi yang telah diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tidak akan menghasilkan implementasi yang efektif jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan (Wisakti, 2008).



mes dalam Wisakti (2008), menyatakan bahwa suatu organisasi terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya.

Lingkungan merupakan sumber pemasok input bagi organisasi, dan juga sebagai penerima output dari organisasi itu sendiri.

Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena jika sumber-sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai maka dipastikan implementasi tidak akan efektif. Sumber-sumber yang dimaksud menurut George C. Edwards III adalah: (a) staff yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, (b) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implemntasi dan (d) adanya wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksnakan kebijakan, (e) fasilitas-fasilitas lain.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan “MTR” adalah:

- a. Kemampuan sumberdaya pelaksanaa
- b. Penyediaan fasilitas pendukung

3. Disposisi/ sikap pelaksana

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Pelaksana dapat

melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, jika dia memiliki disposisi yang baik. Sebaliknya jika pelaksana



memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

Lestari (2014), mengatakan bahwa terdapat tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- a. **Kognisi** yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana karena apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.
- b. **Arahan dan tanggapan pelaksana**, hal ini meliputi bagaimana penerimaan, keberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c. **Intensitas respon atau tanggapan pelaksana**. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap



pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur disposisi/ sikap adalah:

1. Respon Pelaksana
2. Kognisi / pemahaman pelaksana

3. Birokrasi/ Struktur organisasi

Defenisi Struktur Birokrasi menurut Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Beliau menekankan perlu adanya (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Beliau juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya (Lestari, 2014).

Organisasi adalah suatu kordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Organisasi karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung pada komunikasi anggotanya untuk mengkoordinasikan aktifitas dalam organisasi itu.



Struktur organisasi dapat dinilai sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Namun dua hal yang tak kalah penting dari organisasi dan struktur organisasi adalah keterhubungan antar organisasi-organisasi implementator berlangsung dan lingkungan organisasi yang meliputi; kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik disekitar organisasi.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah:

1. Kordinasi pelaksana
2. Pembagian tugas
3. Kondisi Sosial dan Budaya masyarakat

C. Program “Makassarta’ Tidak Rantasa”

‘Makassarta’ Tidak Rantasa’ (MTR) adalah program pencanangan cinta akan kebersihan yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar dalam rangka mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar. Program ini dideklarasikan di Gedung Celebes Cenvetion Center (CCC) pada acara akbar A’bbulo Sibatang Lompoa, tanggal 16 Juni 2014 oleh Walikota Makassar (Ujung Pandang Ekspres dalam Nur, 2015).

Makna Tidak Rantasa dalam bahasa Makassar berarti tidak kotor dan tidak jorok. Secara sosiologis Walikota dan Wakil Walikota Makasar menggunakan bahasa Tidak Rantasa untuk membangkitkan Siri’ Na



Pacce Bugis Makassar yang akan selalu malu jika tidak menjaga kebersihan.

Oleh karena itu, Kebijakan/ program Makassar Ta Tidak Rantasa merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan kota yang dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak melalui salah satu jargon kebijakan/program “MTR” yaitu “Lhat Sampah Ambil (LISA)”. Dalam hal ini pemerintah Kota Makassar sadar bahwa konsep MTR perlu dukungan masyarakat sehingga pemerintah kota akan selalu menyosialisasikan dan mengajak masyarakat terus terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah perilaku membuang sampah pada sembarang tempat.

Beberapa diskusi dan pidato yang disampaikan oleh Walikota Makassar di depan masyarakat, sering mengatakan bahwa Rantasa dapat diartikan secara luas, tidak hanya diartikan sebagai sampah yang berserakan di kanal, got, dan lingkungan yang penuh sampah dan kotor. Akan tetapi, menyangkut ketertiban pedagang kaki lima, pasar, lokalisasi, dan drainase. Selain itu, rantasa juga harus dimaksudkan dalam hal membersihkan perilaku korupsi, penyuapan di instansi pemerintah sehingga *good governance* dapat terealisasi (Nur, 2015).

Pallawa dkk. (2014), menyatakan bahwa pelaksanaan Program

“Makassartata’ Tidak Rantasa” memiliki tujuan untuk merubah
r masyarakat agar tidak rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan



selalu hidup bersih. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar dalam Nur (2015), menyatakan bahwa sasaran program “MTR” adalah meningkatkan kapasitas penanganan sampah dan kebersihan dengan rencana strategis yaitu menanamkan budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah sehingga melahirkan program “MTR” dengan target awal tahun 2015 ditujukan kepada 20 kelurahan dan pada tahun 2018 sebanyak 143 kelurahan telah melaksanakan program “MTR”. Selain itu, indikator keberhasilan program “MTR” adalah Masyarakat Kota Makassar merasa puas terhadap pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Nur (2015), menambahkan bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Makassar telah membuat beberapa kegiatan baik ditingkat Kota Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW, yaitu Lorong Garden (LONGGAR), Kerja Bakti, Sosialisasi Gerakan Makassar’ Tidak Rantasa (GEMAR MTR) dan Sampah Tukar beras.

1. Lorong Garden (LONGGAR)

Program Longgar ini merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong kota agar lebih produktif. Lorong yang ada ditata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman sayur, tomat, cabai dan lainnya. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman yang dapat bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari.



2. Kerja Bakti

Pemerintah Kota Makassar membuat jadwal kerja bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungan sekitar dirinya. Secara konseptual, pelaksanaan kerja bakti tersebut dibagi menjadi tiga hari yaitu jumat bersih, sabtu bersih dan minggu bersih. Semua elemen wajib berperan aktif dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat membersihkan di lingkungan sekitar. Kegiatan kerja bakti ini merupakan salah satu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota untuk selalu membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan dan hidup tidak rantasa.

3. Sosialisasi Gemar MTR

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan Program “MTR” dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk sosialisasi kelurahan itu dilakukan dari rumah ke rumah dengan membagikan brosur-brosur.

4. Gerakan Sampah Tukar Beras

Gerakan ini dilakukan dalam meningkatkan manajemen persampahan dan mengubah perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan sehingga masyarakat dapat memilah sampah organik dan anorganik. Setelah itu sampah anorganik tersebut dapat ditukar di bank sampah dan menjadi tabungan bagi



masyarakat yang menukarkan sampahnya tersebut. Dengan adanya kegiatan Sampah Tukar Beras ini, maka masyarakat kurang membuang sampah pada sembarang tempat dan akan memilah sampah-sampah yang bernilai ekonomi.

Program “MTR” khususnya pada kegiatan kerja bakti telah menjadi salah satu kegiatan yang diprogramkan di GPIB Jemaat Bahtera Kasih khususnya dalam program tahun 2018-2019. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Kerja Bakti.

D. Pembagian Peran Gender

Gender berasal dari bahasa Latin “*genus*”, berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan manusia yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh keluarga dan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama.

Peran gender adalah peran yang diciptakan oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharapkan melakukan peran yang instrumental atau berorientasi pada pekerjaan untuk memperoleh



nafkah, sedangkan perempuan melakukan peran yang berorientasi pada emosi manusia (Megawangi,1999). Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adaptasi, pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Peran gender sebagai hasil bentukan dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan (Vries dalam Dewanti, 2008). Diferensiasi peran (division of labor) antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis melainkan lebih disebabkan oleh faktor sosial budaya. Adanya penemuan teknologi seperti teknologi kontrasespsi, membawa perempuan yang semula tugas utamanya melahirkan, menyusui, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengasuhan anak, berubah dapat mengatur jumlah anak yang dilahirkan sehingga dapat mengatasi kendala biologis yang menghambat mereka bekerja disektor-sektor yang tadinya didominasi kaum laki-laki.

Konstruksi peranan pada akhirnya memunculkan peran yang harus dimainkan oleh individu, baik peran produktif, peran reproduktif, maupun peran pengelolaan masyarakat dan politik. Fakih dalam Rochmayanto dan Kurniasih (2013), menjelaskan bahwa:

1. Peran produktif adalah peran yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperoleh upah secara tunai atau menghasilkan barang-barang yang tidak dikonsumsi sendiri. Contohnya bekerja di sektor formal dan informal.



2. Peran reproduktif adalah peran yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga. Contohnya melahirkan, memasak, mengasuh anak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya.

3. Peran pengelolaan masyarakat dan politik. Peran pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial) mencakup kegiatan yang sifatnya menjalin kebersamaan, solidaritas antar masyarakat seperti arisan, upacara adat, dan tampa upah. Sedangkan pengelolaan politik adalah peran yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada tingkat formal secara politik, biasanya dibayar dan meningkatkan status/kekuasaan.

Pembagian peran/ kerja gender mengarah kepada hierarki dan ketimpangan, karena peran/ kerja laki-laki dan perempuan tidak dinilai dan dihargai sama, bahkan merugikan pihak tertentu terutama perempuan. Pemberian label oleh masyarakat berdasarkan pembagian peran reproduksi/ domestik kepada perempuan membatasi perempuan untuk berperan di wilayah publik dan produktif.

Pembagian peran/ kerja gender yang berdampak pada pemberian pada laki-laki atau perempuan juga turut mempengaruhi terjadinya tumpang tindih peran gender dalam berbagai aktivitas di tengah keluarga dan



masyarakat, termasuk dalam berbagai kegiatan pembangunan baik dalam kebijakan maupun dalam program pembangunan. Pembagian peran/kerja gender juga menjadi dasar untuk melihat kesenjangan gender dalam implementasi program “MTR” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih.

E. Analisis Gender

Menurut Handayani dan Sugiarti (2002), untuk mengetahui secara lebih tepat tentang arti perbedaan-perbedaan bentuk dan sifat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan diperlukan metode analisis. Teknik analisis gender merupakan salah satu teknik yang telah diakui keampuhannya dalam memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang adanya perbedaan maupun saling ketergantungan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, serta adanya perbedaan tingkat manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dari hasil pembangunan.

Sari (2014 : 48), menyatakan bahwa analisis gender adalah suatu alat untuk menyusun kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang

an dan pembangunan. Dalam menerapkan strategi tersebut an suatu alat (tools) yang menjadi dasar dari setiap proses



pengarusutamaan gender baik dalam aspek kebijakan, program dan kegiatan yang akan dikembangkan atau dilaksanakan. Alat tersebut adalah analisis gender yang variatif namun kesemuanya dimulai dengan penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan serta dapat menggambarkan adanya kesenjangan gender misalnya dalam aspek akses, peran, control, dan manfaat.

Oleh karena itu, analisis gender sangat diperlukan dalam mengevaluasi suatu kebijakan pembangunan karena bermanfaat untuk membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, dapat memberi gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara objektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak (Sari, 2014).

Ada berbagai macam teknik analisis gender, antara lain, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teknik analisis Pathway atau Gender Analysis Pathway (GAP). Sarjunani dalam Handayani dan Sugiarti, 2002, menyatakan bahwa GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan dan program pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. GAP

ngkan oleh Bappenas dan digunakan para perencana
gunan dalam melakukan proses perencanaan sehingga



menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Selain itu, dengan menggunakan GAP para perencana kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issue) serta rencana kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan pembangunan guna memperkecil kesenjangan gender.

Handayani dan Sugiarti, 2002. Mengemukakan kegunaan GAP dan POP(Policy Outlook And Plan Of Action) adalah sebagai berikut:

1. Menelaah secara tajam permasalahan kesenjangan gender serta faktor-faktor yang memengaruhinya, agar dapat disusun isu-isu kebijakan yang dapat dijadikan dasar guna menghasilkan kebijakan pembangunan yang responsif gender.
2. Membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan di semua sektor.
3. Menjadi salah satu alat untuk membantu perencana/ peneliti dalam mendesain atau merencanakan program-program yang lebih memihak kepentingan laki-laki maupun perempuan.
4. Menghasilkan berbagai produk kebijakan/ proyek/ program yang berperspektif gender.
5. Menyusun dan mengembangkan indikator keberhasilan dalam pembangunan yang berwawasan gender, serta melakukan

monitoring keberhasilan program-program aksinya pada setiap waktu yang diperlukan.



Selanjutnya menurut Handayani dan Sugiarti juga menyatakan bahwa GAP adalah kerangka sistematis dalam rangka merumuskan isu-isu kebijakan gender melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan semua sektor; pertama-tama melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah bidang pembangunan sebagaimana yang tertulis dalam berbagai dokumen kebijakan atau perencanaan nasional.
2. Data pembuka wawasan. Langkah ini diambil untuk melihat secara keseluruhan adanya ketidakseimbangan pembangunan menurut jenis kelamin.
3. Analisis faktor kesenjangan; analisis terhadap berbagai ketidakseimbangan program pembangunan dilakukan menurut jenis kelamin. Tujuannya adalah menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam setiap dimensi pembangunan. Faktor-faktor tersebut terdiri atas empat kelompok, yaitu faktor akses, partisipasi, faktor kontrol, dan faktor manfaat (benefit) pembangunan.
4. Analisis isu gender bidang pembangunan; merumuskan isu-isu kebijakan gender berdasarkan kebijakan yang ada data kesenjangan, serta faktor-faktor kesenjangan gender sebagai bahan bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan yang paling tepat dalam memerangi masalah kesenjangan gender dalam pembangunan.



5. Indikator kesetaraan gender; terlebih dahulu merumuskan sejumlah indikator keberhasilan yang menunjukkan kesetaraan gender, kemudian isu-isu kebijakan gender itu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program-program aksi di semua sektor bidang pembangunan.

F. Kebijakan Responsif Gender

Kebijakan responsif gender pada hakekatnya merupakan manifestasi dari salah satu prinsip *good governance* dengan salah satu kriterianya *equity*, yakni ketika semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka (UNDP sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara dalam Nurhaeni, 2009 : 63). Selanjutnya Nurhaeni, menambahkan bahwa hal ini terkait dengan upaya kebijakan responsif gender yang secara khusus mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, baik menurut kelompok umur (tua-muda), kelompok ekonomi (kaya-miskin) maupun kelompok marginal (cacat-normal).

Nugroho, dalam Nurhaeni (2009 : 63), menganjurkan empat strategi untuk menjalankan kebijakan agar tidak bias gender : Pertama,

para pelaksana memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro gender. Kedua, memastikan bahwa ada *reward* dan



punishment bagi pematuh dan pelanggarnya. Ketiga, mempunyai ukuran kinerja yang pro gender. Keempat, mengevaluasi kinerjanya, dengan persyaratan pokok yang harus dipenuhi antara lain: (1) adanya kesamaan konsepsi tentang gender dan kesetaraan gender; (2) adanya kecukupan kemampuan untuk melakukan evaluasi dalam konteks kesetaraan gender, (3) alat ukur evaluasi itu sendiri harus mampu mencerminkan pelaporan tentang sejauhmana kesetaraan gender dicapai oleh sebuah kebijakan publik.

Nurhaeni (2009 : 65), menambahkan bahwa kebijakan bias gender merupakan kebijakan yang cenderung merugikan salah satu jenis kelamin, sebab dapat merugikan terhadap laki-laki dan atau merugikan terhadap perempuan. Oleh karena itu, supaya kebijakan-kebijakan publik yang dibuat tidak merugikan salah satu jenis kelamin, maka diperlukan analisis gender sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik berprespektif gender sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender yakni yang tidak merugikan salah satu jenis kelamin, tetapi justru memihak kepada laki-laki atau perempuan yang dirugikan atau tertinggal. Namun, kebijakan responsif gender tidak lagi diperlukan pada saat situasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam keadaan relatif setara.



G. Sekilas Tentang Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB)

1. Sejarah Singkat GPIB

Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) merupakan bagian dari Gereja Protestan Indonesia (GPI) yang sebelumnya yakni zaman sebelum perang dunia dikenal dengan nama “ *De Protestantische Kerk In Nederlands Indische* “ atau “ *Die Indische Kerk* “. Secara resmi GPIB berdiri sendiri dalam lingkungan GPI pada tanggal 31 Oktober 1948 di Jakarta.

Salah satu keunikan GPIB selaku pewaris dari GPI adalah tidak memiliki latar belakang historis yang berpangkal atau bertitik tolak pada kegiatan zending secara langsung dari suatu daerah dengan masyarakat yang homogen secara etnologi (suku bangsa) tertentu sebagaimana ketiga gereja anggota GPI lainnya yaitu, Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM), Gereja Protestan Maluku (GPM), dan Gereja Masehi Injili Timor. Karena itu warga jemaat GPIB latar belakang suku warganya beragam (heterogen).

Ketika pertama berdiri pada tahun 1948, wilayah pelayanan GPIB terdiri atas tujuh klasis (kini disebut Musyawarah Pelayanan/MUPEL) dan 53 Jemaat yang tersebar diberbagai wilayah nusantara.

Saat ini jumlah Jemaat GPIB terdiri atas 323 Jemaat yang tersebar di 1000 gereja di 10 provinsi yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat,



Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan berpusat di Jakarta, serta terbagi di tujuh Wilayah Musyawarah Pelayanan, antara lain Wilayah Musyawarah Pelayanan Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbara) yang berpusat di Makassar.

2.Perangkat Pranata Gerejawi GPIB

Sebagai sebuah gereja dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya, GPIB mempunyai sejumlah perangkat gereja yaitu; Pemahaman Iman, Tata Gereja, Pokok-Pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG), Akta Gereja, Tata Ibadah, serta ketetapan gereja lainnya.

Ada tiga perangkat gereja yang terkait langsung dengan penelitian ini dan dijabarkan yakni Pemahaman Iman, Tata Gereja dan Pokok-Pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG)..

a. Pemahaman Iman

Majelis Sinode GPIB (2015), mendefinisikan bahwa Pemahaman Iman GPIB adalah pengakuan (*confesion*) yang menjawab beberapa persoalan yang sedang dihadapi GPIB pada masa kini yang sifatnya tambahan (*addendum*) terhadap pengakuan iman (*credo*). Ada tujuh Pokok-pokok Pemahaman Iman GPIB, antara lain I. Keselamatan, II. Gereja, III. Manusia, dan IV. Alam dan Sumber Daya.

pada Pokok I tentang Keselamatan khususnya pada alinea dan ketujuh menegaskan:



“Bahwa Allah yang Esa dengan firmanNya dalam kasihNya telah memulai karya keselamatan bagi alam semesta sejak awal penciptaan dan setelah kejatuhan manusia dalam dosa melalui Yesus Kristus sampai akhir zaman. Sebagai umat yang diselamatkan termasuk melalui kemerdekaan yang dikaruniakan Allah kepada bangsa Indonesia, bertanggung jawab mengupayakan pembebasan dari ketidakadilan, perusakan alam dan pelecehan hak asasi manusia, kemerosotan etis-moral dan bentuk penindasan lainnya”.

Pada pokok II tentang Gereja, GPIB mengakui bahwa kehadirannya sebagai suatu umat dipanggil oleh Allah Bapa untuk menjadi berkat. Sedangkan dalam Pokok III tentang manusia khususnya pada alinea 1,2,4 dan 5; GPIB mengakui bahwa pada satu sisi manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sepadan oleh Allah menurut rupa dan gambar-Nya, dan pada sisi lain diciptakan Allah sebagai makhluk religius dan makhluk sosial yang diberikan kemampuan untuk membangun relasi secara positif dengan sesamanya demi kebersamaan dan kesejahteraan seluruh ciptaan-Nya. Manusia juga bertanggung jawab untuk bekerja memelihara dan melestarikan alam, serta diberi kemampuan dan wewenang menata-layani alam beserta isinya.

Pada pokok IV tentang Alam dan Sumberdaya khususnya pada alinea I, III dan VI, menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam dan sumber daya-nya dan mempercayakan pengelolaanya kepada negara demi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup sesama ciptaanNya.

Manusia wajib memelihara alam dan sumber dayanya dengan penuh

dan tanggung jawab. Dengan pembaharuan Roh Kudus, Gereja memiliki kewajiban moral untuk bersama-sama pemerintah dan bangsa-



bangsa berusaha menata ekologi dan mencegah pengrusakan alam (Majelis Sinode GPIB, 2015).

Bertolak dari pemahaman GPIB diatas, menegaskan bahwa GPIB sebagai gereja yang diutus ketengah dunia mengakui bahwa sejak semula Allah telah melaksanakan karya penyelamatan-Nya bagi alam semesta. Selain itu, sebagai umat (manusia) laki-laki dan perempuan yang diciptakan sepadan oleh Allah serta beroleh keselamatan-Nya diberikan kemampuan dan tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan alam. Pada sisi lain, gereja/ umat memiliki kewajiban moral bekerja sama dengan pemerintah dan bangsa dalam menata ekologi dan mencegah perusakan alam.

b. Tata Gereja

Tata gereja adalah himpunan dan susunan semua penata aturan gereja yang teranyam dan terurai dengan serasi, seimbang dan selaras untuk mengatur dan memberi arah bagi seluruh kegiatan gereja.

Pada Tata gereja dirumuskan Tata Dasar yang mencakup beberapa hal antara lain tentang pengakuan dan pemahaman iman sebagaimana yang dijelaskan diatas dan tentang Visi dan Misi GPIB.

Visi: GPIB menjadi Gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Nya

Misi: (1)Menjadi Gereja Yang terus-menerus diperbarui dengan bertolak dari firman Allah, yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja baik dalam persekutuan, maupun dalam hidup bermasyarakat.

(2)Menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam



masyarakat, dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera.

(3)Menjadi Gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan dan semangat persatuan dan kesatuan warga Gereja sebagai warga masyarakat.

Tata dasar ini merupakan Dasar hukum yang di atasnya dibangun semua Peraturan Pokok dan Peraturan-Peraturan selanjutnya.

Pada Tata Dasar tersebut dijabarkan menjadi tiga Peraturan Pokok dan Lima belas Peraturan-Peraturan, antara lain menjabarkan tentang beberapa hal, yakni:

(1).Jemaat

Jemaat adalah wujud dari Gereja Yesus yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli, yang berada di suatu tempat tertentu dalam wilayah pelayanan GPIB.

(2).Majelis Jemaat

Majelis Jemaat adalah persekutuan kerja para presbiter(Pendeta, Penatua dan Diaken) yang merupakan pimpinan GPIB di lingkup Jemaat.

Tugas Majelis Jemaat antara lain, adalah :

(2.1).Menjabarkan keputusan dan ketetapan Persidangan Sinode GPIB dan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Majelis Sinode dengan berpedoman pada Visi dan Misi GPIB;

(2.2)..Membuat rencana kerja anggaran dan menetapkan Program Kerja

dan Anggaran(PKA) yang mengacu pada KUPPG



(3). Ketua Majelis Jemaat (KMJ)

KMJ adalah pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode dalam jabatan struktural, sekaligus Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

(4). Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ)

(4.1). PHMJ adalah pelaksana sehari-hari dari keputusan Sidang Majelis Jemaat;

(4.2). PHMJ terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat;

(4.3). PHMJ terdiri atas beberapa fungsionaris Majelis Jemaat yang dipilih melalui Sidang Majelis Jemaat (kecuali Ketua Majelis Jemaat dan dilaporkan kepada Majelis Sinode untuk ditetapkan;

(4.4). PHMJ dipilih untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang diputuskan berdasarkan PKUPPG;

(5). Pembagian Tugas PHMJ

Tugas para ketua bidang PHMJ mengikuti pembidangan dalam PKUPPG.

(5.1).Ketua Majelis Jemaat membidangi:

Teologi; meliputi Bidang Iman, Ajaran, Ibadah, Musik Gereja dan Pengkajian Teologi.

(5.2).Ketua I membidangi:

Pelayanan dan Kesaksian, meliputi bidang pengembangan dan

penatalayanan Pos Pelkes, PMKI, Diakonia, Crisis Centre, Satgas penanggulangan bencana.



(5.3).Ketua II membidangi:

Gereja, Masyarakat dan Agama-agama (GERMASA), mencakup Ke-Esaan gereja (oikumene), Kemasyarakatan: Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum, Lingkungan Hidup dan Lintas Agama-Agama.

(5.4).Ketua III membidangi :

(5.4.1).Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI): meliputi bidfang Pembinaan dan Pengembangan Warga Gereja (Warga Jemaat Kategorial dan Presbiter)

(5.4.2).Pelayanan Kategorial (PELKAT), Peningkatan Peran Keluarga Anak, Teruna, Pemuda, Perempuan, Bapak dan Kaum Lanjut Usia), Kelompok Profesi dan Fungsional.

(5.5).Ketua IV membidangi Pembangunan Ekonomi Gereja, meliputi bidang Keuangan (perbendaharaan dan akuntansi), Daya dan Dana, Pemanfaatan dan Pengembangan Harta Milik Gereja, Badan Usaha/ Badan Hukum GPIB.

(5.6). Ketua V membidangi:

(5.6.1).Informasi, Organisasi dan Komunikasi (INFORKOM) : Meliputi bidang sistim informasi managemen (SIM), Perencanaan Organisasi dan Komunikasi.

(5.6.2).Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)



(5.7). Sekretaris:

(5.7.1).Bersama Ketua membidangi Teologi dan Persidangan
Gerejawi

(5.7.2).Bersama para Ketua menetapkan kebijakan Majelis
Jemaat, pengendalian administrasi, pengintegrasian
kegiatan, dan Personalialia;

(5.7.3).Bersama Ketua V menangani Bidang yang menjadi
tanggung jawab Ketua V

(5.8). Sekretaris I :

Bersama Ketua I dan Ketua II menagani bidang-bidang yang
menjadi tanggung jawab Ketua I dan Ketua II

(5.9). Sekretaris II ;

Bersama Ketua III dan Ketua IV menangani bidang-bidang yang
menjadi tanggung jawab Ketua III dan Ketua IV menangani bidang-
bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua III dan Ketua IV.

(5.10). Bendahara:

(10.1). Perbendaharaan;

(10.2) Pengelolaan Keuangan

(5.11). Bendahara I:

(11.1) Perbendaharaan

(11.2). Pembukuan



(6). Pelayanan Kategorial Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (PELKAT GPIB)

Pelkat adalah unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori agar para anggotanya berperan aktif dalam pengembangan panggilan dan pengutusan gereja secara utuh dan berkesinambungan.

Pelayanan Kategorial adalah pelaksana misi gereja, kepada:

- (6.1) Anak-anak disebut Pelayanan Anak disingkat PA berusia sampai dengan 12 tahun;
- (6.2) Teruna disebut Persekutuan Teruna disingkat PT berusia 13-17 tahun.
- (6.3) Pemuda disebut Gerakan Pemuda disingkat GP berusia sekitar 18 sampai maksimal 35 tahun;
- (6.4) Kaum Ibu disebut Persekutuan Kaum Perempuan disingkat PKP berusia 35 tahun keatas atau belum berusia 35 tahun tetapi sudah menikah.
- (6.5) Kaum Bapak disebut Persekutuan Kaum Bapak, disingkat PKB berusia 35 tahun keatas atau belum berusia 35 tahun tetapi sudah menikah.
- (6.7) Kaum Lanjut Usia disebut Persekutuan Kaum Lanjut Usia disingkat PKLU berusia diatas 60 tahun.

) Tugas dan Tanggung Jawab anggota dan Pengurus Pelkat antara lain;



(6.8.1) Semua Pengurus Pelkat bertugas untuk memberikan masukan kepada Majelis Jemaat dalam rangka penyusunan program jemaat sesuai dengan kategori masing-masing;

(6.8.2) Semua anggota Pelkat bertanggung jawab atas panggilan dan pengutusan gereja melalui pelaksanaan program Jemaat secara khusus dalam hal membina warga gereja sesuai dengan kategori agar dapat menjalankan misi gereja.

(6.8.3) Pengurus Pelkat bertugas membantu Majelis Jemaat untuk memikirkan, merencanakan dan mengevaluasi program pembinaan, pelayanan dan kesaksian warga gereja di lingkup Jemaat.

Berdasarkan penjabaran Tata Gereja diatas semakin menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makassar'ta Tidak Rantasa khususnya kerja bakti lingkungan sesuai dengan Visi dan Misi GPIB. Kegiatan dimaksud melibatkan Warga dan Majelis Jemaat, terutama Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) khususnya Ketua II sebagai Penanggung jawab Program dan Ketua V dan Pelkat PA, PT, GP serta PKP dan PKB sebagai Pendukung Program.

c. POKOK-POKOK KEBIJAKAN UMUM PANGGILAN DAN

PANGGILAN DAN PENGUTUSAN GEREJA (PKUPPG)

gertian PKUPPG



PKUPPG adalah garis besar atau pokok kebijakan umum GPIB dalam memenuhi panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan dunia dalam suatu periode tertentu (20 tahun). Sebagaimana hakekat gereja, maka PKUPPG merupakan dasar dan pedoman dari setiap perangkat organisasi yang mengemban tugas serta kewajiban gereja dalam menjabarkan program-program kerja, agar lebih terarah, terencana dan berkesinambungan.

PKUPPG merupakan perwujudan dari Gereja Misioner yang mempunyai misi untuk selalu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dengan menjadi garam dan terang bagi dunia serta mengharapkan umat-Nya dapat duduk, makan bersama menikmati persekutuan kerajaan Allah. Kehadirannya diwujudkannyatakan melalui program-program kerja dalam bidang Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian sebagai fungsi utama dan pokok gereja.

(2).Landasan

PKUPPG disusun berdasarkan :

(2.1). Alkitab

(2.2).Pengakuan Iman Gereja (credo)

Pengakuan Iman Rasuli

Pengakuan Iman Nicea Constantinopel

Pengakuan Atahanasius

(2.3).Dokumen Keesaan Gereja (DKG PGI)

(2.4).Pemahaman Iman GPIB



(2.5).Tata Dasar GPIB

(3). Maksud dan Tujuan

PKUPPG disusun dan ditetapkan dengan maksud sebagai arah, pedoman dan tolak ukur bagi gereja dalam melaksanakan tugas tanggungjawab dan kewajibannya dalam memenuhi panggilan dan pengutusannya.

Tujuan PKUPPG agar gereja (GPIB) mampu mewujudkan tugas-tugas itu melalui program dan aksi nyata sebagai tanda kehadiran Kerajaan Allah, dan tanda kehidupan yang menjadi garam dan terang dunia serta pembawa damai sejahtera Yesus Kristus.

PKUPPG GPIB ditetapkan secara bertahap yakni pada tahap Jangka Panjang I dalam periode waktu 20 tahun, sejak 1986-2006, yang ditetapkan sebagai tahapan pertumbuhan memasuki Jemaat Misioner. Kemudian pada PKUPPG Jangka Panjang II tahun 2006-2026 merupakan kesempatan bagi GPIB untuk hadir sebagai gereja yang membangun dan mengembangkan Gereja Misioner, yaitu gereja yang mengalami sungguh-sungguh damai sejahtera Yesus Kristus dan menjadi Gereja yang membawa damai sejahtera Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat bahkan dunia.

Pelaksanaan PKUPPG saat ini berada pada tahap II (2006-2026) dengan tema jangka panjang 20 tahun, berdasar dan bersumber dari

Firman Allah yaitu "Yesus Kristus adalah Sumber Damai dan Kebahagiaan" (Yohanes 14:27). Tema ini diuraikan dalam sub-tema yang



masing-masing merupakan jangka pendek untuk lima tahun. Sub-tema yang merupakan KUPPG jangka pendek lima tahunan ini diuraikan lagi dalam sub-sub tema yang merupakan Tema Tahunan. Dengan demikian tujuan jangka panjang, tujuan antara, maupun tujuan jangka pendek, bahkan program tahunan, semuanya bersumber dari tema Firman Allah yang jelas.

Saat ini pelaksanaan PKUPPG Jangka Pendek berada pada tahap III yakni periode lima tahun (2016-2021) dengan tema: “Mengembangkan sumberdaya gereja untuk meningkatkan Pelayanan dan Kesaksian yang mendatangkan damai sejahtera di tengah dan bersama masyarakat”.(Lukas 1:79). Kemudian dijabarkan menjadi Tema Tahunan antara lain; a.Tema Tahun 2017-2018:

“Mengaryakan Pelayanan dan Kesaksian Dengan Mewujudkan Kebebasan, Keadilan, Kebenaran, dan Kesejahteraan Bagi sesama dan alam semesta” (Lukas 4:18-19); b. Tema Tahunan 2018-2019; Tema Tahun 2018-2019: “Membangun spiritualitas damai yang menciptakan pendamai” (Yakobus 3:13-18), (Majelis Sinode GPIB,2015).

Pembagian tema-tema tersebut menjadi 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun, masing-masing mempunyai fungsi. Tema 20 tahun berfungsi sebagai dasar dan landasan dari GPIB untuk menjalankan kegiatan penatalayanan gereja dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Tema 20 tahun ini juga merupakan panduan dari GPIB dalam perwujudan “Visi” dan “Misi” GPIB untuk kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh GPIB 20 tahun kedepan.



Tema Lima Tahunan berfungsi sebagai acuan dari kegiatan pelayanan GPIB selama 5 tahun kedepan. Tema lima tahun diharapkan dapat memnuhi nilai-nilai tema 20 tahun sebagai dasar dan landasan GPIB dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan di dalam jemaat.

Tema Satu Tahun atau Tema Tahunan merupakan penjabaran dari tema 5 tahun yang proses perumusannya dilakukan bersama dengan tema 5 tahun. Tema Tahunan ini merupakan langkah dari perwujudan tema 5 tahun dan tema 20 tahun. Tema Tahunan ini berfungsi sebagai dasar dan acuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh GPIB dalam 1 tahun.

Perihal pemakaian ayat Alkitab pada setiap tema bertolak pada pemahaman bahwa GPIB adalah gereja yang dibangun atas dasar konsep alkitabiah yang tidak bisa dilepas dari Alkitab sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan bergereja. Alkitab berfungsi sebagai payung teologi bagi GPIB untuk merencanakan program-program yang akan dijalani.

PKUPPG yang menjadi acuan seluruh program kerja di seluruh jemaat GPIB khususnya Jemaat Bahtera Kasih, secara tidak langsung menunjukkan bahwa semua program kerja yang ditetapkan setiap tahunnya termasuk Program "MTR" (Kerja Bakti) tahun 2018-2019 adalah hasil dari sebuah proses pergumulan yang matang /serius. Oleh karena

memerlukan respon dan keterlibatan yang serius dari semua jemaat. Sebab apalah arti program kerja yang ditetapkan



melalui proses yang matang dan serius bila tidak terimplementasi atau terlaksana dengan baik. Apakah arti Program “MTR” (Kerja Bakti) ditetapkan di tengah Jemaat Bahtera Kasih bila tidak diikuti dengan komitmen dan tanggung jawab dari semua pihak GPIB Jemaat Bahtera kasih dalam mewujudkan damai sejahtera melalui pengimplementasian kegiatan “MTR” (kerja Bakti) ditengah jemaat.

Dengan demikian bertolak dari penjabaran disekitar perangkat pelayanan diatas yakni: Pemahaman Iman, Tata Gereja, dan PKUPPG yang dikaitkan dengan penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Program “MTR” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar: Analisis Gender”, maka akan terlihat bagaimana warga jemaat secara umum sebagai sasaran program/ kebijakan dan Majelis Jemaat/ Kordinator Sektor Pelayanan di 12 seipel khususnya Ketua II sebagai Penanggung Jawab Program dan Ketua V, Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB dan PKLU sebagai Pendukung Program merespon program “MTR”/Kerja Bakti sebagai wujud tanggung jawab iman dan moril kepada Allah dan Pemerintah serta terhadap sesama mahluk ciptaan-Nya.

H.Hasil Penelitian yang Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian

ah penelitian yang dilakukan oleh Indriyani Pallawa dkk., pada 014 yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Program Gerakan



Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan tentang desain program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa serta efektivitas pelaksanaan programnya, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu Jargon, Kegiatan dan Pelibatan Elemen pendukung berdasarkan teori Richard M. Street dengan melihat tiga indikator dalam mengukur efektifitas pelaksanaannya yaitu Pencapaian tujuan, Integritas dan Adaptasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program "MTR" cukup efektif dari sisi adaptasi yakni dalam hubungan kerja sama untuk melaksanakan kegiatan itu sudah berjalan cukup baik. Sedangkan dari sisi partisipasi masyarakat belum ada peningkatan secara signifikan.

Penelitian lainnya oleh Muhammad Khaedir dan Ibsik Sangkala pada tahun 2015 yang berjudul "Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Tamalate kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan tujuan (1) Untuk mengetahui program "MTR" di kecamatan Tamalate, (2) Untuk mengetahui implementasi program "MTR" di kecamatan Tamalate, (3) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala masyarakat kecamatan Tamalate dalam memaksimalkan program "MTR". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program "MTR" yang dicanangkan Walikota Makassar khususnya di kelurahan Mannuruki yakni Lihat Sampah Ambil

Lorong Garden (LONGGAR), Kerja Bakti Massal, Sampah Tukar dan Sekolahku Tidak Rantasa sudah terlaksana, namun belum



maksimal, (2) Kendala dalam pengimplementasian Program “MTR” di kelurahan Mannuruki dapat dilihat dari segi faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pengangkut sampah (gerobak sampah), sempitnya pekarangan maupun lahan kosong, kurangnya tempat sampah sementara, dan drainase.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Novri Ardi Wiranata Nur pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan menggambarkan desain pelaksanaan program gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa dan efektivitas pelaksanaan program gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Desain pelaksanaan program “MTR” menggunakan tiga pendekatan yaitu Jargon, Kegiatan, dan Pelibatan Elemen Pendukung, (2) Berdasarkan efektivitas pelaksanaan program yang menggunakan teori Richard M. Steers dengan indikator Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi, maka penulis menilai program “MTR” berjalan kurang baik karena belum dapat memenuhi indikator-indikator tersebut, (3) Beberapa kekurangan program ini yaitu: a. Tidak memiliki aturan Perda ataupun Perwali, b. Tidak memiliki batasan waktu yang berdampak terhadap pencapaian tujuan yang tidak jelas dan sulit untuk dievaluasi, c. Pelaksanaan Program tidak maksimal.

penelitian berikutnya oleh Hardianti dkk., pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassar Ta’



Tidak Rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Lisa pada program “MTR” dalam menyadarkan pentingnya kebersihan lingkungan di Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan teori Grindle maka hasil penelitian ini menyimpulkan (1) Program Lisa belum sepenuhnya mengatasi permasalahan sampah, (2) Program ini didukung oleh program lain seperti: Lorong Garden dan Bank sampah, (3) Tingkat kesadaran mahasiswa melihat sampah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar juga masih kurang.

Perbandingan beberapa penelitian yang relevan diatas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu Implementasi Program “ Makassar Tidak Rantasa “ di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar: Analisis gender. Selain itu teori yang digunakan adalah teori George Edwards III serta menggunakan analisis gender Pathway atau *Gender Analysis Pathway (GAP)*.

Penelitian yang relevan lainnya oleh Andi Kamelia Makkarumpa (2017), yang berjudul “Dampak Kebijakan Pelindungan Khusus pekerja Perempuan Terhadap Proses Perekrutan di Kota Makassar, studi kasus pada PT Mahameru Mitra Makmur.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus/pemilik PT Mahameru Mitra Makmur pada umumnya telah

akan/melaksanakan kebijakan perlindungan khusus pekerja dan dengan baik, yakni dengan memberikan kesempatan kepada



para pekerja perempuan yang akan menggunakan hak cutinya dalam rangka menjalankan fungsi reproduksi. Meski demikian masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya terutama dalam hal pengaturan pemberian waktu cuti yang masih belum sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan belum tersedianya fasilitas bagi pekerja perempuan untuk menyusui anaknya. Temuan lain yakni dalam proses perekrutan terdapat perbedaan pemberian kesempatan kepada pekerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki yang dibuktikan dengan jumlah pekerja perempuan jauh lebih sedikit. Kondisi ini disebabkan karena penerapan kebijakan tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemilik dan pengurus PT Mahameru Mitra Makmur serta masih adanya pengklasifikasian jenis jabatan berdasarkan jenis kelamin yang disebabkan masih kurangnya pemahaman gender dan adanya gender streotyp yang merugikan pekerja perempuan. Perbandingan penelitian yang relevan tersebut dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian tentang dampak sebuah kebijakan, sedangkan penelitian ini tentang implementasi sebuah program yaitu program “MTR” meskipun keduanya sama-sama menggunakan kajian analisis gender(Gender Analysis Pathway).

I. Kerangka Pikir



untuk melihat Implementasi “Makassarta’ Tidak Rantasa” (MTR) di
Jemaat Bahtera Kasih Makasar, terlebih dahulu “Program

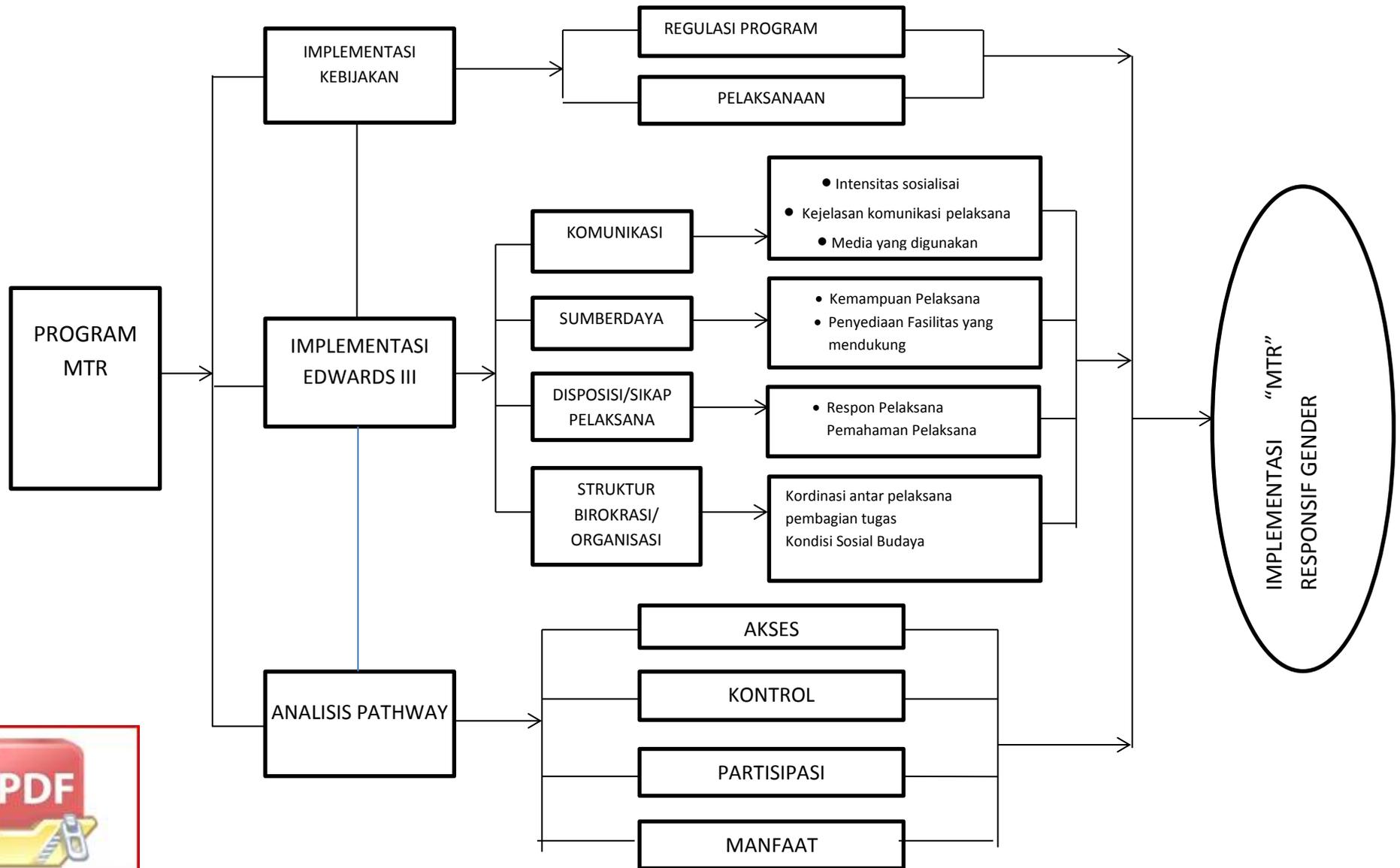
Makassarta' Tidak Rantasa dalam penelitian ini harus dibagi menjadi tiga variabel, yaitu Implementasi Kebijakan dan Implementasi Model Edwards III, serta Analisis Pathway.

Selanjutnya pada bagian Implementasi Kebijakan akan dibahas Isi Kebijakan / Program dan Pelaksanaannya.

Pada bagian Implementasi Edwards III terdiri atas empat variabel yaitu (1) Komunikasi dengan indikator Intensitas Sosialisasi, Kejelasan Komunikasi Pelaksana dan Media yang digunakan, (2). Sumber daya dengan indikator Kemampuan Pelaksana dan Penyediaan Fasilitas yang mendukung, (3) Disposisi atau Sikap Pelaksana dengan indikator Respon Pelaksana dan Pemahaman Pelaksana, (4) Struktur Birokrasi/Organisasi dengan indikator Kordinasi antar Pelaksana, Pembagian Tugas dan Kondisi Sosial Budaya.

Pada Analisis Pathway terdiri atas empat variabel yaitu Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat.





Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data tentang implementasi program “MTR” di GPIB jemaat Bahtera Kasih Makassar yang optimal dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif.

Nasution (1988:5) dalam Sugiyono (2008:180), menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah pendekatan yang dilakukan bukan hanya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, tetapi berinteraksi dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah beberapa orang, yaitu warga jemaat Bahtera Kasih sebagai sasaran program “MTR” dan para pelaksana yang meliputi Pelaksana Harian Jemaat, Pengurus Pelayanan Kategorial, kordinator Sektor Pelyanan, Koster Gereja dan Petugas kebersihan. Untuk memperoleh data tentang implemetasi program “MTR” yang responsif gender, maka penelitian ini menggunakan analisis gender yakni analisis gender Pathway (*Gender*

Pathway)



Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara terperinci faktor-faktor yang memengaruhi kurang optimalnya pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan atau program dimaksud sehingga pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan/program untuk merumuskan kembali penyempurnaan dari program Implementasi “MTR” yang responsif gender.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Bahtera Kasih Makassar, yang terletak di Jalan Tidung X No. 18. Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Adapun pertimbangan atau alasan penetapan lokasi penelitian ini adalah karena GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menetapkan program “Makassarta’ Tidak Rantasa” khususnya kegiatan Kerja Bakti menjadi salah satu program kegiatan jemaat, khususnya bidang gereja dan masyarakat.

Penelitian ini mengambil tiga Sektor Pelayanan yang ada di wilayah GPIB Jemaat Bahtera Kasih, yaitu Sektor Pelayanan 4, 7, dan 11 dengan pertimbangan Sektor Pelayanan 4 merupakan wilayah Kecamatan Rappocini, Sektor Pelayanan 7 merupakan wilayah Kecamatan

...kang, dan Sektor Pelayanan 11 merupakan wilayah Kecamatan
a.



C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang bagaimana regulasi dan pelaksanaan yang terkait dengan implementasi MTR, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi “MTR” yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/ Sikap pelaksana dan Struktur Birokrasi. Data primer bersumber dari wawancara dan observasi meliputi hasil pengamatan di lapangan.

Data sekunder bersumber dari penelusuran dan penelaahan studi dokumen yang terdapat di lokasi penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain meliputi: dokumen Profil GPIB Jemaat bahtera Kasih, Program Kerja GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Daftar Hadir Kerja Bakti, dan beberapa foto kegiatan kerja bakti, wawancara, dan lain-lain.

Tabel. 3.1. Jenis dan Sumber Data Primer

Jenis data	Sumber Data	Posisi/ Informan	Jabatan	Laki-laki/ Perempuan
Pelaksanaan Program Kerja Bakti Rutin di GPIB Jemaat BK	Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ)	Ketua II,	Bidang Gereja, Masyarakat dan Agama-agama (GERMASA)	Laki-laki
	Petugas Kebersihan	Karyawan		Perem Puan
	Koster Gereja	Karyawan		Laki-laki



	Majelis Jemaat Sektor Pelayanan (Sekpel) IV	Koordinator Sekpel IV/ Penatua	Laki-laki
	Warga Sekpel IV	Anggota	Perempuan
	Majelis Jemaat Sektor Pelayanan VII	Koordinator Sekpel VII/ Penatua	Perem Puan
	Warga Jemaat sekpel VII	Anggota	Laki-laki
	Majelis Jemaat Sekpel XI	Koodinator Sektor (Koorsek) Pelayanan XI/Penatua	Laki-laki
	Warga Sekpel XI	Anggota	Perem puan
Faktor-faktor Yang memengaruhi Implementasi "MTR" di GPIB Jemaat BK	Majelis Jemaat dan Warga Sekpel IV, VII dan XI	Koordinator dan Anggota Sekpel IV, VII dan XI	sda
	PHMJ	Ketua Majelis Jemaat (KMJ), Bidang Teologi	Laki-laki
		Ketua II, Bidang Germasa	Laki-laki
		Mantan ketua II	Perem Puan
	Ketua III, Bidang PPSDI dan PELKAT	Laki-laki	
	Ketua V, BIDANG INFOKOM DAN LITBANG	Laki-laki	
Konsep Gender	Pengurus Pelayanan Kategorial (Pelkat)		
	Pelayanan Anak (PA)	Wakil Ketua	Perempuan
	Persekutuan Teruna (PT)	Wakil Ketua	Perempuan
	Gerakan Pemuda (GP)	Ketua	Perempuan
	Persekutuan Kaum Perempuan (PKP)	Ketua	Perempuan
	Persekutuan Kaum Bapak	Ketua	Laki-laki
Persekutuan Kaum Lanjut Usia	Ketua	Perempuan	



Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data Sekunder

SEJARAH DAN PERANGKAT GPIB	DOKUMEN KANTOR GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH
SEJARAH DAN PROFIL GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH	DOKUMEN KANTOR GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH
PROGRAM KERJA GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH TAHUN 2017-2018	DOKUMEN KANTOR GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH
DATA TERPILAH	DOKUMEN KANTOR GPIB JEMAAT BAHTERA KASIH

D.Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat proses pengumpulan data, yaitu Observasi, studi literatur dan wawancara serta dokumentasi

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan secara langsung maupun terlibat dalam aktivitas secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas nara sumber di lokasi penelitian.



2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memberi data dan membantu hasil penelitian secara mendalam dengan responden yang telah ditentukan. Untuk itu, diperlukan kemampuan dalam hal melontarkan pertanyaan kepada responden.

Wawancara bertujuan membantu membuktikan hasil penelitian secara empirik berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh dan semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan mengajak pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun informan yang diwawancarai sebanyak 18 orang, terdiri atas 9 perempuan dan 9 laki-laki.

3. Studi Literatur

Studi Literatur dilakukan melalui buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan “Makassarta’ Tidak Rantasa”. Melalui studi literatur maka diharapkan dapat memperkaya serta memperdalam pengetahuan dan landaan teori penulis dalam mengkaji penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah



kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan, dan yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2008:82).

E.Defenisi Operasional

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mencoba menjabarkan defenisi operasional yang digunakan pada penelitian ini agar dijadikan sebagai acuan.

1. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan dan dapat diukur melalui Isi Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan.
2. Program "MTR" adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah kebersihan lingkungan (persampahan) di Kota Makassar dengan salah satu kegiatannya yaitu Kerja Bakti,
- 3.Implementasi model Edwardsd III yang dimaksud adalah suatu pengejewantahan kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/ Sikap Pelaksana, Struktur
asi/ Organisasi.



4. Komunikasi yang dimaksud adalah sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang “MTR”, baik antar pelaksana maupun dari pelaksana kepada warga jemaat selaku kelompok sasaran yang disampaikan secara intens, jelas dengan penggunaan media yang tepat.
5. Sumberdaya yang dimaksud adalah ketersediaan potensi yang ada di GPIB Jemaat Bahtera kasih berupa informasi tentang kebijakan/ program “MTR”, kemampuan (tingkat pendidikan) pelaksana, dan fasilitas baik dana maupun alat-alat yang mendukung program “MTR”/ Kerja Bakti.
6. Disposisi/ Sikap Pelaksana yang dimaksud adalah sikap dan komitmen berupa pemahaman dan respon pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.
7. Struktur Birokrasi/ Organisasi yang dimaksud adalah mekanisme kerja berupa kordinasi dan pembagian tugas antar pelaksana yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya.
8. Peran Gender yang dimaksud adalah peran yang diciptakan oleh arakat bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu sebagai hasil



bentukan sosial peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda serta dapat dipertukarkan.

9. Akses yang dimaksud adalah tersedianya jalan masuk/ informasi yang sama, sebanding bagi laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya/ kegiatan pembangunan.
10. Partisipasi yang dimaksud adalah adanya peluang dan kesempatan yang sama, sebanding untuk ikut serta dalam penguasaan sumberdaya/ kegiatan pembangunan.
11. Kontrol yang dimaksud adalah tersedianya peluang dan kesempatan yang sama, sebanding untuk pengambilan keputusan dalam penguasaan terhadap sumberdaya/ kegiatan pembangunan.
12. Manfaat yang dimaksud adalah adanya peluang dan kesempatan yang seimbang untuk memperoleh manfaat dari suatu program atau kegiatan pembangunan

D. Teknik Analisis Data

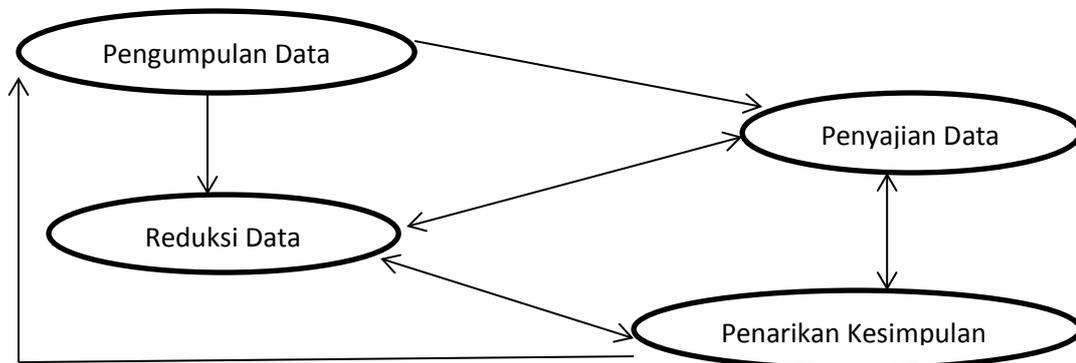
Sugiyono (2008: 89), menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

organisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang



penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 92), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 3.1. Analisis data model Interaktif

Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 92)

1. Pengumpulan data: Data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan observasi maupun data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi dilakukan secara berkelanjutan dan cermat agar diperoleh data yang benar dan dibutuhkan untuk menjawab permasalahan program “MTR” di GPIB

semaat Bahtera Kasih Makassar.



2. Reduksi data: Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting pada data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data: Tahap selanjutnya setelah data yang telah direduksi adalah penyajian data. Pada penelitian ini data yang berkaitan dengan program “MTR” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih disajikan dengan menggunakan teori implementasi Edwards III yang dikombinasikan dengan penggunaan teknis analisis gender Pathway (*Gender Analysis Pathway*) yang dapat membaca relasi antara laki-laki dan perempuan.
4. Penarikan Kesimpulan
Data yang telah direvisi dan disajikan, selanjutnya dilakukan proses penarikan kesimpulan yakni temuan berupa deskripsi atau gambaran tentang Implementasi Program “MTR” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar yang responsif gender.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum GPIB Jemaat Bahtera Kasih

1. Profil GPIB Jemaat Bahtera Kasih

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Bahtera Kasih beralamat di Jalan Tidung X Nomor 18, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini Makassar. Dibangun diatas lahan seluas 2250 meter persegi dan dilengkapi dengan Rumah Pendeta (Ketua Jemaat) yang disebut Pastori, Gedung Serba Guna yang terdiri atas tiga lantai yakni lantai I merupakan Aula, Lantai II Kantor Gereja, Lantai III Sekolah PAUD dan Rumah Koster , serta Pos Keamanan.

Berdiri sebagai Jemaat yang mandiri pada tanggal 27 Maret 1983 dan merupakan Jemaat ke-5 di Regio II Mupel Sulselbara serta Jemaat ke-155 dilingkungan GPIB yang ada di Indonesia. Jumlah anggota jemaat seluruhnya per tahun 2017 adalah sebanyak 489 Kepala Keluarga dan 2713 jiwa, terdiri atas laki-laki 1330 orang dan perempuan 1383 orang. Jumlah tersebut terbagi atas 12 Sektor Pelayanan (Sekpel), dikordinir dan dilayani majelis –masing sektor yang berjumlah seluruhnya 144 orang, as laki-laki 72 orang dan perempuan 72 orang.



Sebagai gereja berlatarbelakang suku yang heterogen, GPIB Jemaat Bahtera Kasih terdiri dari jemaat yang berasal dari beragam suku di Indonesia yakni, Manado, Sangir, Ambon, Toraja, Timor, Batak, dll, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah karyawan, wiraswasta, pengusaha, guru dan dosen, Polisi, dls. Demikian juga latar belakang pendidikan yang beragam dengan persentase 60 % S1 keatas dan selebihnya SMA, Diploma , S2 dan S3.

Pelayanan bidang kategorial (Pelkat) terdiri atas: Pelayanan Anak (PA). Persekutuan Teruna (PT), Gerakan Pemuda (GP), Persatuan Kaum Perempuan (PKP), Persekutuan Kaum Bapa (PKB), Persekutuan Kaum Lanjut Usia (PKLU). Pendukung pelayanan lainnya yakni komisi-komisi yang dibentuk sesuai bidang kebutuhan, bekerja dan bertanggung jawab kepada ketua-ketua bidang yang disebut Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ).

Tempat ibadah hari Minggu, selain di gedung Gereja Bahtera Kasih yang berada di Jalan Tidung X No.18 juga terdapat di Gereja Ayalon Aspol Toddopuli serta di Wilayah Minasa Upa, di Rutan dan Lerbaga Pemasarakatan dalam pelayanan Persukutuan Umat Binaan Kristiani.

2. Gambaran Umum Kegiatan Jemaat Bahtera Kasih

Bertolak pada Program Kerja Jemaat menunjukkan bahwa
...aan program/ kegiatan Jemaat baik rutin maupun non rutin
...i di lingkungan Gedung Gereja maupun di luar lingkungan Gereja,
...arena itu, sesuai dengan fokus penelitian ini yakni tentang



pelaksanaan “MTR” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, maka di bawah ini akan dijabarkan beberapa kegiatan/Program yang dilaksanakan di lingkungan Gereja dalam sepekan.

Tabel 4.1. Jenis Kegiatan di lingkungan Gereja

No.	Nama Program/Kegiatan	Hari/Pukul	Lokasi	Peserta	Jumlah	Keterangan
1.	Ibadah Hari Minggu	Minggu, a.Pkl. 06.00-07.30 b.Pkl. 09.00-10.30 c.Pkl. 16.30-18.00 d.Pkl.19.00-20.30	GBK	Warga Jemaat dan Pelayan serta pendukung ibadah	a.185 orang (L=75,P=110) b.277 orang (L=111, P=166) c.276 orang (L=110, P=166) d.313 orang (L=132, P=181)	
2.	Katekisasi	Minggu, 11.00-12.30	GBK	Pendeta dan Warga Jemaat Usia 16-18	26 orang (P=16, L=10)	
3.	Perkantoran	Selasa-Sabtu, Pkl.09.00-16.00	Kantor, Lt.2	Karyawan, PHMJ	10 karyawan gereja dan 11 PHMJ	
4.	PAUD	Senin-Jumat, Pkl.08.00-12.00	Sekolah Paud Lt.3	Guru dan Siswa		
	siapan Pelayanan lah: inggu, Sekpel,	Senin, Pkl.19.00-20.00	Gedung Serba Guna LT.I	Pendeta, Majelis Jemaat	25 orang/ sesuai	



	<p>Pelkat (PKP,PKB,GP)</p> <p>b.Pelkat PA, PT</p> <p>c.Pedukung Ibadah Minggu di Gereja, di 4 Pos Pelayanan lain.</p>	<p>Senin, Pkl.19.00-20.00</p> <p>Sabtu, 19.00</p>	<p>Gereja BK</p> <p>Gereja BK</p>	<p>yang bertugas</p> <p>Pendeta dan Pelayan PA, PT</p> <p>Pemandu Lagu, Organis, Operator Sound System dan Operator LCD</p>	<p>kebutuhan 50 orang (L=5 orang, P=45 orang) 20 orang (L=8,P=12)</p>	
6.	<p>Latihan Paduan Suara / Tim Musik</p> <p>a.Pelkat Kaum Perempuan</p> <p>b.Pelkat Kaum Bapa Jemaat</p> <p>c.Kaum Bapa Pelita Kasih</p> <p>d.Pelkat Lansia</p> <p>e..Pelkat Gerakan Pemuda (Ekllesia)</p>	<p>Jumat,20.00</p> <p>Senin, 08.00</p> <p>Kamis, 8.00</p> <p>Senin, 17.00</p> <p>Selasa dan Jumat, 19.00</p>	<p>Gedung Serba Guna</p>	<p>Pelatih, Pengurus dan anggota PS.PKP</p> <p>Pelatih, Pengurus dan Anggota PS.</p> <p>Pelatih, Pengurus dan Anggota PS</p> <p>Pelatih, Pengurus dan Anggota PS</p> <p>Pelatih, Pengurus dan Anggota PS</p>	<p>40 orang</p> <p>15 orang</p> <p>15 orang</p> <p>30 orang</p> <p>20 orang</p>	
	<p>Major Tri (Tim Musik Pemuda)</p>	<p>Selasa, 17.00 dan Rabu, 19.00</p>	<p>Ruang Kedap Suara</p>	<p>Pelatih, Pengurus dan Anggota PS</p>	<p>8 orang</p>	



	g.Pelkat PA	Sabtu Pkl. 18.00	Gereja BK	Pelatih, Pengurus dan anggota PS	25 orang	
	h.Pelkat PT	Kamis dan Sabtu, Pkl.19.00	Gedung Serba Guna	Pelatih, Pengurus dan Anggota PS	25 Orang	
	i.Kivo Tones (Tim Musik Teruna)	Selasa dan Kamis, Pkl.	Ruang Kedap Suara	Pelatih dan anggota	8 orang	
	j.Vox Cantorum	Senin,18.00	Ruang Kedap Suara	Pelatih, Pengurus dan Anggota PS	15 orang	
7.	Rapat Rutin PHMJ	Jumat,	Ruang PHMJ	PHMJ	11 orang	
8.	Pelayanan Kesehatan	a.Selasa, Pkl.12.00 b.Kamis, Pkl.12.00 c.Sabtu,Pkl. 12.30 d.Minggu, Pkl.07.30	Klinik Gereja	Dokter dan Warga (pasien)	Sesuai kebutuhan	
9.	Kerja Bakti	Sabtu, Pkl.16.00	Gereja dan Lingkungan sekitar	Warga Jemaat Sektor yang terjadwal		
10.	Konsultasi Hukum	Sabtu	Kantor	Tim Konsultasi Hukum dan warga jemaat	Sesuai kebutuhan	

Sumber : Dokumen GPIB Jemaat Bahtera Kasih

Penjabaran kegiatan rutin yang dilaksanakan di gereja dan
 ya tersebut menggambarkan padatnya kegiatan yang
 akan di gereja dan sekitarnya dari hari Minggu – Sabtu dengan



melibatkan warga jemaat dari anak-anak sampai dewasa laki-laki dan perempuan yang memungkinkan untuk menghasilkan sampah berupa pembungkus gula-gula, kue/snack, botol/gelas mineral, abu rokok, dll.

Kondisi ini tentu akan berdampak pada kebersihan lingkungan gereja dan sekitarnya, serta tidak bisa diselesaikan hanya oleh pihak tertentu yakni oleh para petugas kebersihan saja. Oleh karena itu membutuhkan peran dan keterlibatan seluruh warga jemaat tanpa terkecuali dalam menangani kebersihan lingkungan baik secara pribadi maupun bersama yakni melalui kerja bakti membersihkan lingkungan gereja.

3. Sampah di Lingkungan GPIB Jemaat Bahtera Kasih

Volume sampah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas Jemaat dalam dua hari mencapai 20 kg. Data tersebut sebagian merupakan jenis sampah organik atau sisa makanan dan daun-daun berasal dari tanaman dan bunga di halaman sekitar gereja.

Sampah yang terkumpul setiap dua hari diangkut/ dibuang melalui petugas kebersihan yang mengendarai mobil beroda tiga dari kelurahan Mappala dan Kecamatan Rappocini yang dikenakan biaya pengangkutan sebesar Rp.200.000/bulan.

Sementara untuk jenis sampah non organik berupa kertas dan gelas /botol air mineral dipisahkan untuk dikumpulkan dan di bawa sampah terdekat oleh Koster Gereja.



4. Gambaran Umum Jemaat Sektor Pelayanan IV, VII, dan XI.

a. Sektor Pelayanan IV.

Jemaat Sektor Pelayanan IV secara geografis berada disekitar wilayah GPIB Jemaat Bahtera Kasih, tepatnya tersebar di Jalan Tidung VI, VII, VIII dan Tidung X, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini. Ada juga di Toddopuli VI dan Permata Hijau, bahkan berada di luar wilayah GPIB Jemaat Bahtera Kasih, seperti di Jalan Cendrawasih, di Tamarunang, Goa, dll.

Jumlah Warga Jemaat hingga tahun 2017 sekitar 84 KK dan 297 jiwa yang terdiri atas 137 laki-laki dan 160 perempuan, dengan penjabaran sebagaimana yang digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Data Jumlah Warga Jemaat IV

No.	Pelayananan Kategorial	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Anak	Anak sampai usia 12 tahun	23	35	58
2.	Teruna	13-17 tahun	25	23	48
3.	Gerakan Pemuda	18-35 tahun	30	25	55
4.	Kaum Perempuan	Usia 35-59		60	60
5.	Kaum Bapak	Usia 35-59	45		45
6	Lanjut Usia	60 Tahun keatas	14	17	31
	JUMLAH		137	160	297

Sumber : Dokumen GPIB Jemaat Bahtera Kasih



Pada penatalayanannya, jemaat sektor pelayanan IV dilayani oleh 11 Majelis jemaat yang terdiri atas 4 laki-laki dan 7 perempuan, dengan pendidikan S1 dan sebagian besar SMA. Disamping itu ada pelayan Pelkat Kaum Perempuan 3 orang, Kaum Bapak 3 orang, Gerakan Pemuda 2 orang (laki-laki dan perempuan), Persekutuan Teruna 2 orang perempuan, Pelayanan Anak 3 orang perempuan, serta lansia 1 orang. Sebagian besar pendidikan para pelayan tersebut adalah SMA dan beberapa S1 dan Diploma.

b. Sektor Pelayanan VII

Sebagian besar warga sekte VII secara geografis berada di wilayah kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang dan sebagian di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang.

Hingga tahun 2018 ini warga jemaat berjumlah 50 KK dan 180 Jiwa, dan terdiri atas laki-laki 80 orang, serta perempuan 100 orang. Dengan penjabaran sebagaimana yang digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Data Warga Jemaat menurut kategorial usia dan jenis kelamin

No	Pelayanan Kategorial	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Anak	Warga sampai 12 tahun	12	12	24
	Teruna	Warga 13-17 tahun	8	9	17
	Pemuda	Warga usia 18-35 tahun	12	15	27



4.	Kaum Perempuan	Warga usia 35-59 tahun		43	43
5.	Kaum Bapak	Warga Usia 35-59 tahun	33		33
6.	Kaum Lansia	Warga usia 60 tahun keatas	15	21	36
	Jumlah		80	100	180

Sumber data : Hasil wawancara dengan Korsek Pelayanan VII

Jemaat Sekpel VII dilayani oleh 18 orang majelis jemaat yang terdiri atas 11 orang perempuan dan 4 orang laki-laki serta pengurus Pelkat 13 orang yang terdiri atas PA =3 orang perempuan, PT=2 orang perempuan, GP=2 orang laki-laki, PKP=3 orang,PKB=2 orang, PKLU=1 orang perempuan yang sebagian besar belatar belakang pendidikan sarjana. Sedangkan untuk pendidikan warga jemaat secara keseluruhan 50 % sarjana, 50 & terdiri atas D3 dan SMA.

Dilihat dari latar belakang ekonomi warga jemaat sekpel VII sebagian besar yakni 55% pengusaha sisanya PNS, wiraswasta.

c. Sektor Pelayanan XI

Jemaat Sektor Pelayanan XI secara geografis berada disekitar wilayah Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini. Selain itu, di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala bahkan ada di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini.

Jumlah Warga Jemaat hingga tahun 2018 sekitar 81KK dan 273

ng terdiri atas 138 laki-laki dan 135 perempuan, dengan an sebagaimana yang digambarkan pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.4. Data Jumlah Warga Jemaat Sekpel XI sesuai kategorial usia dan jenis kelamin

No.	Pelayanan kategorial	Usia	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	Anak		17	27	44
2.	Teruna		8	11	19
3.	Pemuda		22	20	42
4.	Kaum Perempuan		72		72
5.	Kaum Bapak			62	62
6.	Kaum Lansia		16	18	34
	JUMLAH		135	138	273

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Koordinator Sekpel XI

Ditinjau dari segi ekonomi, sebagian besar warga jemaat memiliki mata pencaharian sebagai karyawan, Guru dan wiraswasta dengan latar belakang pendidikan S1 dan SMA.

Pada penatalayanannya, jemaat sektor pelayanan XI dilayani oleh 14 Majelis jemaat yang terdiri atas 7 laki-laki dan 7 perempuan, dengan pendidikan sebagian besar S1 dan selebihnya SMA, bahkan ada S2. Disamping itu ada pelayan Pelkat Kaum Perempuan 2 orang, Kaum Bapak 2 orang, Gerakan Pemuda 2 orang (laki-laki dan perempuan), Persekutuan Teruna 2 orang perempuan , Pelayanan Anak 3 orang perempuan, serta lansia - orang. Sebagian besar pendidikan para pengurus tersebut adalah S1 dan beberapa SMA.



B. Implementasi Program “Makassarta’ Tidak Rantasa”

1. Regulasi Pelaksanaan

Ada beberapa hal yang menjadi regulasi atau dasar pelaksanaan “MTR” khususnya “Kerja Bakti” di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, antara lain:

- a. Teks Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26-28, dll, tentang amanat Allah kepada umat untuk menjaga dan memelihara lingkungan/ alam.
- b. Visi dan Misi GPIB yang termuat dalam perangkat GPIB yakni Pemahaman Iman, Tata Gereja dan Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) yang menjadi dasar dari semua kegiatan dan program gereja secara Sinodal, Musyawarah Pelayanan dan Jemaat, secara internal maupun eksternal dalam kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah, antara lain dalam mendukung program pemerintah khususnya program “MTR”.
- c. Keputusan Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Nomor : 166/SMJ/GBK/05/2018, tentang Program Kerja dan Anggaran Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar periode 2018-2019, khususnya Bidang II Germasa butir 13 B tentang Kerja bakti rutin membersihkan rumah gereja dan halaman sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sepatutnya seluruh umat gereja baik majelis maupun warga jemaat merespon penuh dan berkesinambungan untuk dapat melaksanakan program ini, sebagai bagian dari tanggung jawab iman dan kasih kepada Allah, juga kasih pada



sesama manusia. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari bidang Germasa (Gereja, Masyarakat dan Agama) itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan Ketua II Germasa (Wawancara tanggal 05 Agustus Pukul 17.58) :

“ Germasa maksudnya Gereja(GPIB) membangun bersama gereja-gereja lain dan bersama agama-agama lain. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yakni menempatkan GPIB bukan lagi dalam gereja tapi ditengah gereja-gereja lain dan agama-agama lain, seperti yang ada di gereja kita dalam program kebersihan lingkungan yakni penghijauan dan kerja bakti serta program pelayanan konsultasi hukum. ”

Pernyataan diatas semakin menegaskan alasan Jemaat Bahtera Kasih hadir bersama masyarakat mendukung program “Makassarta’ Tidak Rantasa“ dalam kegiatan Kerja Bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja.

2. Kegiatan “Makassarta’ Tidak Rantasa”

Pelaksanaan Program “Makassarta’ Tidak Rantasa” pada dasarnya bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak rantasa dalam kehidupan sehari-hari dan selalu hidup bersih. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mantan KMJ dalam wawancara tanggal 7 Agustus 2018,Pukul 20.22, mengatakan bahwa:

“Tujuan dari “MTR” sebenarnya juga mencakup pada apa yang tertuang dalam ungkapan “Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat (*Mens sana in corpore sano*)”, artinya tubuh dan jiwa yang sehat (tidak rantasa) sangat didukung oleh lingkungan yang bersih/ tidak rantasa”.



Untuk mencapai tujuan tersebut Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih melalui Bidang Germasa telah menetapkan program yang terkait dengan Program “MTR” yang melibatkan kerja sama dengan pemerintah setempat juga melibatkan partisipasi warga jemaat serta melibatkan karyawan gereja yakni Koster dan petugas kebersihan antara lain;

a. Pemeliharaan Penghijauan Lingkungan Gereja dan sekitarnya

Secara umum kegiatan “MTR” tampak melalui upaya menjaga kebersihan dan keindahan/ penghijauan lingkungan gereja dengan pengadaan tanaman bunga di halaman gereja melalui partisipasi warga jemaat. Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga jemaat dan pemerintah setempat di Kelurahan Mappala dan Kecamatan Rappocini yang memberi kepercayaan kepada GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengikuti lomba kebersihan lingkungan. Pada tahun 2016 Sekolah Paud Tunas kasih dipercayakan mengikuti lomba kebersihan lingkungan antar Paud se-Kecamatan Rappocini dan mendapat Juara I. Kemudian pada tahun 2017 GPIB Jemaat Bahtera Kasih mendapat kepercayaan mengikuti lomba kebersihan antar Gereja se-Kota Makassar dan mendapat Juara II.

Selain itu respon Jemaat tampak melalui kegiatan pemilahan sampah kertas/dos dan plastik kemasan air minum gelas dan botol dari sampah lain (sampah organik) oleh Koster yang dikumpul dan dijual ke

sampah terdekat. Bahkan kegiatan pendauran ulang dari gkus kopi kemasan kapal api dll menjadi kerajinan tangan berupa



tas, tempat tissue oleh beberapa ibu dalam Pelkat PKP Jemaat. Begitu juga bagi para Pengurus PA (pengajar Anak) yang memanfaatkan dos kemasan susu, dll menjadi bahan alat peraga dalam proses mengajar bagi anak-anak dalam ibadah Minggu maupun bagi para guru dalam proses mengajar di Paud.

Untuk kegiatan kebersihan lingkungan gereja secara rutin tiap hari dilaksanakan oleh karyawan gereja yakni Koster (laki-laki) dan Cleaning Servis laki-laki dan perempuan. Koster membersihkan didalam gedung gereja yakni menyapu dan mengepel serta membersihkan kursi, jendela dan fasilitas yang berada di dalam gedung gereja yang dilakukan setiap hari, kecuali untuk kegiatan mengepel lantai gedung gereja dilakukan setiap hari sabtu sebagai persiapan kegiatan Ibadah Minggu. Khusus pada hari Minggu kegiatan membersihkan disesuaikan dengan waktu kegiatan ibadah yaitu pkl.06.00, 09.00, 16.30 dan 17.00. Kegiatan membersihkan atau menyapu hanya bisa dilakukan seusai ibadah pukul 09.00. Sementara diwaktu antara, yakni setelah ibadah pukul 06.00 dan 16.30 hanya dapat dilakukan dengan memungut sampah berupa pembungkus permen dan snack. Jadwal tersebut belum termasuk dengan kegiatan khusus atau isidentil yang dilaksanakan dalam gedung gereja seperti kegiatan ibadah pernikahan, pemakaman dan ibadah perayaan gereja dll, yang juga menghasilkan sampah serta menuntut waktu dan

ekstra untuk membersihkan.



Sementara bagi Ibu YTM sebagai salah seorang petugas kebersihan bertanggung jawab setiap hari membersihkan lingkungan ruang Kedap suara yang dipakai untuk latihan Paduan suara dan tim Musik, Gedung Serba Guna yang dipakai untuk kegiatan pertemuan dan latihan paduan suara bahkan dalam acara ramah tamah jamuan makan dalam setiap acara/ibadah-ibadah tertentu/khusus serta membersihkan toilet laki-laki dan perempuan. Selain itu ibu YTM dan Koster bapak ET sebagai pasangan suami istri bekerja sama membersihkan ruang kantor dan beberapa ruang yang terletak di lantai 2 diatas gedung serba guna. Sedangkan bapak L selaku petugas kebersihan lainnya bertanggung jawab setiap hari (kecuali hari senin) terhadap kebersihan lingkungan di luar gereja dan penataan taman di sekitar halaman gereja dan rumah pastori/ rumah pendeta (Hasil wawancara dengan Ibu YTM dan Koster Gereja).

b. Kerja Bakti Rutin

Bentuk penjabaran Program “MTR” yang lain dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah kegiatan kerja bakti rutin jemaat yang dilaksanakan secara bergiliran pada tiap sektor pelayanan setiap hari sabtu. Kegiatan kerja bakti sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di kalangan jemaat Bahtera Kasih. Sebab jauh sebelumnya “Kerja Bakti” sudah menjadi budaya/tradisi di kalangan Jemaat khususnya dalam pembangunan Gedung Gereja baik semi permanen pada tahun



1982 maupun permanen tahun 1984-1990, sebagaimana yang disampaikan oleh Pasullean (2014), yang menyebutkan:

“Setelah warga jemaat dihimbau agar terlibat langsung dalam pekerjaan pembangunan, semua warga jemaat turut serta secara aktif; anak-anak dan orang dewasa, tua dan muda, pria dan wanita, sarjana dan bukan sarjana, pejabat dan bukan pejabat, orang berada dan orang sederhana, semuanya ikut mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan.”

Demikian juga kerja bakti dalam memelihara dan membersihkan lingkungan gereja dan sekitarnya telah giat dilakukan oleh warga jemaat sejak awal ketika jemaat telah memiliki lahan dan tempat / gedung gereja, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu AT selaku warga jemaat sekpel XI dalam wawancara pada tanggal 10 Desember 2018, Pukul 13.34 yang menyebutkan:

“Kerja bakti sudah menjadi kegiatan rutin warga jemaat sejak dulu, seperti pada tahun 89-90an saat saya pernah menjabat sebagai Pengurus Persatuan Kaum perempuan (PKP) dan selanjutnya menjadi Majelis. Saat itu Pengurus pelkap PKP sangat berperan dalam menghimbau warga jemaat dan terlibat aktif didalamnya yang kemudian diikuti oleh bapak-bapak dari Pelkat PKB. Meskipun media informasi yang dipakai pada saat itu sangat terbatas hanya lewat penyampaian lisan, namun warga jemaat sangat kompak dalam melaksanakan kerja bakti. Hal ini terlihat melalui kehadiran jemaat yang cukup besar setiap hari sabtu secara bergiliran membawa alat seperti sapu, lap dari rumah kemudian membersihkan ruang gedung gereja menyapu, mengepel dan melap kursi, mimbar dan kaca jendela bagian dalam dan luar sampai naik keatas memberfsihkan balkon.”

Dengan demikian dari informasi tersebut semakin menegaskan kegiatan kerja bakti khususnya dalam pemeliharaan kebersihan an gereja sudah tidak asing lagi di kalangan Jemaat Bahtera sejak masa lalu yang begitu antusias menghadiri kegiatan kerja



bakti, meski dengan jumlah warga saat itu yang terbatas dan media serta fasilitas yang dipakai juga terbatas. Berbeda dengan respon warga saat ini dengan kehadiran tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari data kehadiran warga jemaat pada kerja bakti khususnya dari Sektor Pelayanan IV, VII dan XI, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Data kehadiran Jemaat Sekpel IV,VII dan XI dalam kerja bakti Rutin

No	Sektor Pelayanan	Waktu	Kehadiran Warga			Keterangan
			Pere mpu an	Laki- laki	Juml ah	
1.	IV (empat)	25 Maret 2018	4	1	5	Prosentase kehadiran 5 dari 290 jiwa=1,7% Terdiri atas PKP=3, PA:L=1,P=1
		16 Juni 2018	11	4	15	Prosentase kehadiran 15 dari 290 jiwa=5,1%
2.	VII (Tujuh)	22 April 2018	6	4	10	Prosentase kehadiran 10 dari 180 jiwa =5,5 % Terdiri atas PKP:4, PKB:2, PKLU: L=2,P=2
		07 Juli 2018	3	-	3	Prosentase kehadiran 3 dari 180 jiwa =1,7% Terdiri atas PKP=3
	Sebelas)	04 Agustus 2018	12	8	20	Prosentase kehadiran 20 dari 273 jiwa= 7,3 % Terdiri atas Anak : L=2,P=2



		27 Oktober 2018	9	6	15	PKP: 8, PKB:5, PKLU: L=1,P=2 Prosentase kehadiran 15 dari 273 jiwa=5,5% Anak: 3 (L=2,P=1), PKP: 6, PKB: 3 orang PKLU:3(L=1,P=2)
--	--	--------------------	---	---	----	---

Sumber : Wawancara dengan Koorsek Pelayanan IV,VII dan XI

Dari pemaparan data diatas dengan kehadiran warga dalam kerja bakti yang rata dibawah 10 % dari jumlah total warga di tiap sektor memberikan gambaran bahwa program “kerja bakti rutin” belum mendapat tempat dihati warga jemaat. Dapat dikatakan berbanding terbalik dengan capaian hasil lomba kebersihan yang dapat meraih juara 1 (Paud) dan 2 (Gereja). Bahkan berbanding terbalik dengan respon warga jemaat mula-mula GPIB Jemaat Bahtera Kasih (80-90an) yang begitu semangat dalam melaksanakan kerja bakti terutama dalam membersihkan dan memelihara lingkungan gereja.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM “MTR’ (KERJA BAKTI)

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi dalam implementasi program Kerja Bakti di GPIB Jemaat Bahtera Kasih sangat ditentukan dari beberapa unsur yang dalam komunikasi, yakni penyampaian dan kejelasan pesan, s sosialisasi dan penggunaan media yang efektif.



a. Penyampaian dan kejelasan pesan

Transmisi atau penyampaian/penerusan pesan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebab dari sana pesan akan diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Demikian juga dengan kejelasan pesan sebab petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut juga harus jelas ketika kebijakan-kebijakan diimplementasikan.

Pelaksana yang menyampaikan pesan tentang program Kerja Bakti adalah Pelaksana Harian Majelis Jemaat khususnya bidang Germasa, Pelkat dan Infokom bersama seluruh Majelis Jemaat melalui Kordinator dan wakil Kordinator sektor Pelayanan serta Pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB dan PKLU Jemaat dan Pelkat Sektor (kec.PKLU). Pada dasarnya mereka berperan sebagai pelaksana sekaligus yang merancang setiap program khususnya kerja bakti.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Germasa bapak ATM dalam wawancara tanggal 5 Agustus, menyebutkan:

“ Meskipun konsep tentang “MTR” secara keseluruhan belum begitu jelas karena yang kami tahu berhubungan dengan soal kebersihan, namun pesan tentang “MTR” atau kerja bakti sudah disampaikan dalam bentuk himbuan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan gereja bahkan dilingkungan rumah masing-masing.”

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Infokom bapak WSB

wawancara pada tanggal 02 Agustus 2018, pukul 22.35,

utkan:



“ Menurut saya pesan sudah disampaikan sehubungan dengan dimasukkannya kerja bakti sejak lama dalam program jemaat serta diatur melalui penjadwalan tiap sektor. “

Kordinator Sektor Pelayanan IV bapak AM menambahkan dalam wawancara pada tanggal 06 Agustus 2018:

“ Pesan sudah sampai ibadah Minggu yang diumumkan melalui warta jemaat untuk tiap sektor yang bertugas. ”

“ Pada sisi lain, Kordinator dan Warga Sektor Pelayanan VII, Ibu ETS dan Bapak GT dalam wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 19.31, yang menyebutkan :

“ Kalau pesannya sudah sampai sesuai dengan jadwal, hanya sebaiknya lebih diperjelas pembagian wilayahnya supaya jemaat yang datang tidak bingung mau kerja apa “

Bapak GT warga sektor pelayan VII yang aktif mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah dalam wawancara pada waktu yang sama, mengakui ketidakaktifannya dalam mengikuti kerja bakti sesuai jadwal sektor di gereja adalah:

“..karena tidak tahu apa yang akan dikerjakan...di bagian mana?”

Pernyataan diatas semakin memperjelas bahwa pesan tentang kerja bakti belum begitu jelas meskipun sudah disampaikan, misalnya apa yang perlu dikerjakan dan bagian/wilayah mana saja yang perlu dibersihkan. Hal ini didukung oleh pernyataan Koster Gereja dalam wawancara pada tanggal 10 Desember, pukul 19.14:



Biasanya warga kerja di halaman bawah pohon, karena tidak ada kejelasan wilayah yang akan dikerjakan, mereka jadi bingung dan memilih sendiri akhirnya terkumpul di satu tempat. “

b. Penggunaan Media

Selain faktor penyampaian dan kejelasan pesan, media yang digunakan juga sangat menentukan berhasil dan tidaknya suatu komunikasi mencapai target sebagaimana yang diinginkan penyampai pesan. Oleh karena itu pemilihan media merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu komunikasi.

Pelaksanaan kerja bakti di Jemaat Bahtera Kasih didukung oleh media yang digunakan yakni melalui media cetak tiap minggu yakni Warta Jemaat, rapat kordinasi dan pengumuman dalam ibadah sektor pelayanan juga Group WhatsApp (WA), serta melalui kotbah-kotbah yang bertemakan Lingkungan hidup.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak RM, Ketua Pelkat PKB dalam wawancara pada tanggal 06 Agustus 2018, pukul 20.08 yang menyebutkan:

“ Media yang dipakai yakni warta jemaat dan melalui rapat kordinasi dan pengumuman di sektor...sudah efektif..”

Namun sekalipun media yang digunakan sudah efektif ternyata belum mendorong keterlibatan warga secara maksimal di tiap sektor karena kurangnya kesadaran warga dan perlu lebih divariasikan. Hal ini diakui oleh beberapa informan antara lain yang menyebutkan:

“...media yang dipakai sudah efektif tapi belum ada kesadaran untuk bertindak..” (Bapak AM Korsek IV dalam Wawancara tanggal 06 Agustus 2018, pukul 20.42)..”

...media yang dipakai sudah cukup baik, tapi perlu dievaluasi lagi supaya lebih banyak dan bervariasi...kalau selama ini



melalui Warta Jemaat, WA group dan pada ibadah sektor...sebaiknya juga melalui ibadah Pelkat, bahkan bila perlu ada saat tertentu ditayangkan gambar/video hasil liputan kegiatan kerja bakti..” (Sdri TJ Ketua Pelkat GP dalam wawancara pada 07 Agustus 2018, pukul 21.40).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyampaian dan kejelasan pesan perlu dimaksimalkan atau ditingkatkan , juga penggunaan media yang perlu divariasikan. Hal lain yang perlu di di pertimbangkan dan diupayakan adalah kontinuitas penyampaian pesan tentang kerja bakti rutin kepada jemaat. Sebab penyampaian pesan yang tidak kontinu dapat menyebabkan baik pelaksana maupun warga jemaat melupakan pesan tersebut.

2. Sumber daya

Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena jika sumber-sumber baik manusia maupun non manusia yang dibutuhkan tidak cukup memadai, maka dipastikan implementasi tidak akan efektif. Dalam hal ini fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi program kerja bakti adalah Kemampuan sumberdaya manusia pelaksana dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung.

a. Kemampuan Sumberdaya manusia Pelaksana

Ada beberapa hal yang mendukung kemampuan para pelaksana di

Bahtera Kasih sangat potensial yakni dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang beragam dan status sosial. Hal ini sesuai



dengan penyampaian Bapak ATM Ketua Germasa dalam wawancara pada tanggal 5 Agustus 2018, pukul 17.58:

“ prosentase pendidikan secara keseluruhan yakni 60 % untuk S1 keatas, sementara 40 % S1 kebawah, begitu juga dengan status sosial sekitar 60 % termasuk golongan menengah keatas. Maka dari potensi tersebut disimpulkan kualitas SDM jemaat cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan, indikatornya bisa bangun gereja permanen juga gedung serbaguna 3 lantai, dls di lingkungan gereja.”

Pernyataan informan diatas juga menggambarkan kualitas sumberdaya para Pelaksana Harian Jemaat dan majelis jemaat serta pengurus pelkat jemaat maupun sektoral.

Hal in dibenarkan oleh beberapa informan sebagai Kordinator sektor pelayanan yang menyebutkan:

“ Latar belakang pendidikan para majelis jemaat dan pengurus pelkat di sektor pelayanan IV yang berjumlah 24 orang terdiri atas 17 perempuan dan 7 laki-laki, sebagian besar adalah S1 dan selebihnya SMA” (Bapak AM Korsek Sektor pelayanan IV dalam wawancara pada tanggal 06 Agustus 2018, pukul 20.42).

“...Para majelis dan pengurus pelkat sektor pelayanan VII berjumlah 31 orang, terdiri atas 23 orang perempuan dan 4 laki-laki. Sebagian besar mereka berpendidikan S1 50% dan selebihnya D3 dan SMA..”(Ibu ETS Kordinator Sektor Pelayanan VII dalam wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 19.31).

“ Untuk sektor pelayanan XI dilayani oleh para majelis dan pengurus pelkat yang berjumlah 25 orang terdiri atas 15 perempuan dan 10 laki-laki yang berpendidikan sebagian besar S1 dan selebihnya SMA bahkan ada S2.” (Bapak EL kordinator sektor pelayanan XI dalam wawancara 1 Desember 2018, pukul 19.00)

Berdasarkan data dari wawancara tersebut diketahui bahwa daya manusia pelaksana Program Kerja bakti Jemaat Bahtera secara umum maupun khusus di sektor pelayanan IV, VII dan XI



dari segi pendidikan sangat potensial sehingga dapat mendukung kemampuan dalam mendorong warga jemaat memiliki kesadaran untuk terlibat dalam kerja bakti.

b. Fasilitas Pendukung

Meskipun para pelaksana telah memiliki kemampuan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan atau program, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai maka implementasinya juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik dalam pelaksanaan kerja bakti berupa alat-alat kebersihan, dana untuk pengadaan alat kebersihan serta snack dan minuman.

Bapak ATM, Ketua Germasa menyebutkan bahwa:

“ ada peralatan yang dibawa oleh warga untuk bersih lingkungan gereja dalam dan luar..sedangkan gereja menyiapkan alat pengangkutan sampah. “(wawancara pada 05 Agustus 2018, pukul 17.58)

Pernyataan senada disampaikan oleh Ibu MP, warga sektor Pelayanan IV dalam wawancara pada tanggal 06 Agustus 2018, pukul 20.41:

“ Fasilitas yang mendukung yaitu fasilitas pengangkut berupa gerobak dan juga alat kebersihan yang dibawa warga..”

Ibu TP Pengurus Pelkat PA dan Ibu NS, Pelkat PT dalam wawancara pada tanggal 03 Agustus 2018, pukul 20.15 masing-masing menyebutkan:

ada tempat sampah yang disiapkan dan ada juga yang dibawa oleh masing-masing jemaat dari rumah..”



Dengan nada yang sedikit berbeda Ibu YTM, Petugas kebersihan mengungkapkan:

“ memang fasilitas sudah dibelanjakan/ disiapkan gereja, namun tidak bertahan lama karena kurangnya kesadaran rasa memiliki dan menjaga inventaris yang disiapkan..”

Dari beberapa penyampaian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pelaksana dan fasilitas pendukung perogram kerja bakti sudah memadai untuk menyukseskan program kerja bakti, meskipun perlu diimbangi untuk perawatan fasilitas/ inventaris gereja.

3. Disposisi / Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana terhadap kebijakan atau program kerja bakti sangat mempengaruhi tercapainya tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program kerja bakti. Ada dua fenomena yang digunakan untuk mengukur disposisi/ sikap adalah :

a. Respon Pelaksana

Pada dasarnya program kerja bakti mendapat respon yang positif dari semua pelaksana terkait yakni setuju dengan adanya program tersebut di Jemaat Bahtera Kasih, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa informan dibawah ini:

“..Sangat setuju dengan program kerja bakti..”(Ibu YW Ketua Pelkat Lansia dalam wawancara pada tanggal 17 Desember 2018, Pukul 17.00)

“..Kerja bakti adalah program yang sangat bagus..kembali ada kesadaran semua komponen majelis jemaat bahkan seluruh jemaat..”(Bapak JS Ketua Pelkat dalam wawancara pada 18 Desember 2018, Pukul 18.27)



Pendapat yang senada disampaikan oleh Bapak WSB Ketua V dalam wawancara pada tanggal 02 Agustus 2018, Pukul 22.35 yang menyatakan:

“ ..saya setuju adanya program kerja bakti di Jemaat kita karena mengajak kesadaran kita menjaga kebersihan lingkungan tempat peribadatan dan kita dapat bersosialisasi..”

b. Kognisi/ Pemahaman Pelaksana terhadap kebijakan

Kerja bakti yang merupakan bagian dari kegiatan “ Makassar’ Tidak Rantasa mempunyai tujuan untuk merubah perilaku dari yang membuang sampah sembarangan kepada yang dapat menjaga kebersihan dan perilaku sehari-hari. Hal ini sangat relevan dengan dasar dan tujuan semua program khususnya kerja bakti di Jemaat yang terkandung dalam Visi dan Misi GPIB antara lain menyebutkan:

“Visi : “GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan-Nya.”

“Misi : 1) Menjadi Gereja yang terus menerus diperbaharui dengan bertolak dari Firman Allah, yang terwujud dari perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam hidup bermasyarakat, dst”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, sebagian besar sebagai pelaksana, mereka sangat paham akan maksud atau manfaat dari program kerja bakti, antara lain mengatakan:

“ kerja bakti sangat relevan dengan Visi/Misi GPIB karena dengan hadir kerja bakti bukan hanya sekedar datang lalu pulang...maksimal banyak manfaat membangun relasi antar sesama..bukan hanya bersih hidup beriman tapi juga bersih lingkungan..”(Sdri. TJ, Ketua Pelkat GP dalam wawancara pada tanggal 07 Agustus 2018, Pukul 07 Agustus 2018)



“..sangat relevan, karena lingkungan yang bersih juga mempengaruhi jiwa yang bersih..”(Ibu YP, Ketua Pelkat PKP Jemaat dalam wawancara pada tanggal 05 Agustus 2018, Pukul 13.26)

“...membersihkan lingkungan atau kerja bakti adalah ibadah aktual.” (Bapak JS Ketua III PHMJ, dalam wawancara pada tanggal 18 Desember 2018, Pukul 18.27)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana merespon positif program kerja bakti dan didukung dengan pemahaman yang baik tentang makna yang sesungguhnya dari kerja bakti yang merupakan perwujudan dari iman atau ibadah aktual.

4. Birokrasi/struktur organisasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Wisakti:2008). Suatu struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi dan dikoodinasikan secara formal.

Ada tiga fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah: Kordinasi para pelaksana, pembagian tugas dan budaya masyarakat.

a. Kordinasi para pelaksana

Meskipun secara rutin ada pertemuan atau rapat kordinasi antar pelaksana, namun ternyata belum menunjukkan bahwa kordinasi antar pelaksana dalam pelaksanaan program kerja bakti sudah berjalan dengan baik. Kondisi ini disampaikan oleh beberapa informan:



“..kordinasi sudah berjalan baik karena ada pertemuan atau rapat rutin baik antar PHMJ dls, namun perlu diakui belum optimal khususnya terkait dengan pelkat sebagai penopang progam..”(Bapak ATM Ketua II PHMJ dalam Wawancara pada tanggal 05 Agustus 2018, Pukul 17.58)

Begitu juga dengan Ibu YP, Ketua Pelkat PKP Jemaat dalam wawancara pada tanggal 05 Agustus 2018 menambahkan:

“..Tidak berjalan maksimal sehubungan dengan pera pelkat sebagai penopang program yang tidak kelihatan selama ini..”

“..berhubung saya dan pengurus2 pelkat rata-rata baru menerima tanggung jawab ini, tapi berdasarkan masukan ini dalam rapat-rapat kordinasi kedepan saya akan sampaikan pada mereka bahwa pelkat bukan sekedar terlibat tetapi menjadi garda terdepan dalam menyukkseskan kerja bakti..”(Bapak JS, Ketua III PHMJ dalam wawancara pada tanggal 18 Desember 2018, Pukul 18.27)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perihal kordinasi pelaksana sebenarnya sudah berjalan meski belum maksimal terutama dalam pelaksanaan kerja bakti yang melibatkan pelkat sebagai penopang program yang perlu dievaluasi untuk ditingkatkan. Sebab tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan program kerja bakti juga ditentukan sejauh koordinasi atau kerja sama antar elemen pendukung atau penopang termasuk Pengurus dan warga Pelkat tingkat Jemaat dan sektoral. Hal ini juga yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan Program “Makassar’ta Tidak Rantasa” di Kota Makassar (Nur, 2015).

b. Pembagian Tugas antar Pelaksana

Adanya Pembagian tugas antar pelaksana program kerja bakti ditentukan dari terlaksananya kordinasi antar pihak terkait. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan fenomena tidak optimalnya kordinasi antar



pelaksana, maka hal tersebut mengakibatkan pembagian tugas antar pelaksana juga tidak maksimal. Hal ini tampak melalui para informan yang memberikan pernyataan senada.

“...pembagian tugas antar pelaksana belum maksimal..sangat berdampak pada keberhasilan program terkait..”(Bapak ATM Ketua II PHMJ dalam wawancara pada tanggal 05 Agustus 2018, Pukul 17.58)

“..pembagian tugas antar pelaksana juga demikian ,belum berjalan dengan baik...” (Ibu YP, Ketua Pelkat Jemaat dalam wawancara pada tanggal 05 Agustus 2018, Pukul 13.26)

c. Sosial Budaya masyarakat

Budaya masyarakat tampaknya cukup mempengaruhi keterlibatan warga dalam kerja bakti. Sebagaimana diketahui masih ada di berbagai daerah di Indonesia yang menganut budaya patriakhal yang mengutamakan laki-laki dan sebaliknya merugikan perempuan melalui pelebelan terhadap perempuan. Urusan domestik atau membersihkan rumah dst itu tanggung jawab perempuan, karena laki-laki bertanggung jawab di dunia publik. Kondisi ini tergambar dalam pernyataan Bapak JS Ketua III PHMJ dalam wawancara pada tanggal 18 Desember 2018 Pukul 18.27, menyebutkan:

“..menjaga kebersihan itu pola pikir bahkan budaya...jangan sampai orang yang dirumahnya bukan pembersih lalu di bawa ke gereja...bapak-bapak kebanyakan berharap sama ibu-ibu, mereka tidak memperhatikan itu menjadi bagian penting..”



Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Ibu NS, Wakil Ketua Pelkat PT dalam wawancara pada tanggal 03 Agustus. Pukul 20.15, yang menyebutkan:

“...terkadang dalam kerja bakti bapak-bapak yang duduk merokok...ibu-ibu yang membersihkan..”

Selain dimensi budaya, diakui bahwa dimensi sosial juga sangat mempengaruhi keterlibatan warga dalam kerja bakti, sebagaimana disampaikan oleh Ibu LD, Mantan Ketua II PHMJ dalam wawancara pada tanggal 07 Agustus 2018, Pukul 19.36, menyebutkan:

“ ...masih ada pelaksana yang beranggapan bahwa soal kebersihan kan ..ada Petugas kebersihan dan Koster..bahkan mereka justru selalu dipersalahkan bila mendapatkan lingkungan gereja yang kotor meskipun mereka sudah membersihkan..”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh ibu AT, warga jemaat Sekpel XI dalam wawancara pada tanggal 10 Desember 2018, Pukul 13.34 yang menyebutkan:

“...kalau soal kebersihan gereja semuanya diserahkan pada Koster dan Cleaning Servise..kasihan setengah mati mereka....”

D. Analisis Kesenjangan Gender pada implementasi program

Kerja bakti

Untuk menganalisis kesenjangan gender yang terjadi pada

kerja bakti di GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan digunakan Analisis Pathway (GAP). Metode ini telah banyak dikembangkan di



Indonesia terutama dalam proses perencanaan program-program yang responsif gender.

Berikut ini adalah metode Gender Analysis Pathway (GAP) digunakan untuk melihat kesenjangan gender yang terjadi pada implementasi program kerja bakti di GPIB Jemaat Bahtera Kasih dengan tiga tahap dan sembilan langkah.

Langkah pertama pada Tahap I menjelaskan bahwa nama kegiatan/ program yang akan dianalisis adalah Kerja Bakti Rutin di GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Adapun tujuannya adalah meningkatkan rasa kepedulian, rasa memiliki, serta rasa tanggung jawab jemaat terhadap Gereja.

Kemudian langkah kedua menampilkan data umum (pembuka wawasan) yang menggambarkan tentang pentingnya kegiatan kerja bakti rutin. GPIB Jemaat Bahtera Kasih beralamat di Jalan Tidung Xnomor 18, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Makassar. Pada tahun 2017, jumlah warga jemaat sebanyak 489 KK, 2713 jiwa yang terdiri atas 1330 orang laki-laki dan 1383 orang perempuan. Sedangkan latar belakang pendidikan warga jemaat berkisar 60% untuk S1 keatas dan latar belakang sosial berkisar 60% golongan menengah keatas.

Dalam penatalayanannya, GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilayani oleh Majelis Jemaat (Pendeta, Penatua dan Diaken) sebanyak 144 orang

diri atas 72 orang laki-laki dan 72 orang perempuan. Dari jumlah 11 orang diantaranya adalah Pelaksana Harian Majelis Jemaat



(PHMJ) yang terdiri atas 3 orang perempuan dan 8 orang laki-laki, dan 24 orang Koordinator dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan yang terdiri atas 9 orang perempuan dan 15 orang laki-laki, serta Pengurus Pelkat (Anak, Teruna, Pemuda, Kaum Bapak, Kaum Perempuan dan Kaum Lansia) sebanyak 158 orang yang terdiri atas 49 orang laki-laki dan 109 orang perempuan.

Data pembuka wawasan lainnya yang terkait dengan program diatas yakni data tentang Pelayan dan Warga jemaat Sektor Pelayanan IV, VII dan XI sekaligus kehadiran mereka dalam kerja bakti rutin.

1. Sektor Pelayanan IV

Per tahun 2017 jumlah warga jemaat sebanyak 84 KK dan 297 jiwa, terdiri atas 160 perempuan dan 137 laki-laki dengan latar belakang pendidikan 40% S1, selebihnya S2, Diploma dan SMA. Jumlah Majelis Jemaat sebanyak 11 orang yang terdiri atas 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, diantaranya 1 orang laki-laki sebagai Koordinator dan 1 orang perempuan sebagai wakil Koordinator. Sedangkan jumlah Pengurus Pelkat sebanyak 13 orang terdiri atas 9 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Latar belakang pendidikan para pelayan (majelis dan Pengurus pelkat) 50% S1, selebihnya SMA dan Diploma. Kehadiran warga jemaat pada kerja bakti rutin pada Sabtu, 25 Maret 2018 sebanyak 5 orang terdiri atas 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jumlah tersebut meliputi

orang dan PA= 2 orang (laki dan perempuan). Persentase n sebanyak 5 orang dari 297 orang adalah 1,7%,. Kemudian pada



Sabtu, 16 Juni 2018 sebanyak 15 orang, terdiri atas 4 orang laki-laki (PKB) dan 11 orang perempuan (PKP). Persentase kehadiran sebanyak 15 orang dari 297 orang adalah 5,1%.

2. Sektor Pelayanan VII

Jumlah warga jemaat per tahun 2017 sebanyak 50 KK, 180 jiwa yang terdiri atas laki-laki 80 orang dan perempuan 100 orang dengan latar belakang pendidikan 60% S1, selebihnya SMA, S2 dan S3. Jumlah Majelis Jemaat sebanyak 11 orang yang terdiri atas 7 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, diantaranya 2 orang masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai koordinator dan wakil koordinator. Jumlah Pengurus Pelkat sebanyak 13 orang yang terdiri atas 9 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Sebagian besar para pelayan memiliki latar belakang pendidikan sekitar 60% S1 dan selebihnya SMA. Kehadiran warga jemaat dalam kerja bakti rutin pada Sabtu, 22 April 2018 sebanyak 10 orang yang terdiri atas laki-laki 4 orang dan perempuan 6 orang yang meliputi PKP=4 orang, PKB=2 orang dan PKLU=4 orang dari jumlah warga 180 orang. Presentasi kehadiran 5,5%; Pada Sabtu, 7 Juli 2018 sebanyak 3 orang perempuan (PKP). Presentase kehadiran 1,7%.

3. Sektor Pelayanan XI

Jumlah warga jemaat per tahun 2017 sebanyak 81 KK, 271 jiwa yang terdiri atas 138 laki-laki dan 135 perempuan dengan latar belakang pendidikan 60% S1 dan SMA. Jumlah Majelis Jemaat sebanyak 14 orang yang terdiri atas 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, 2 orang diantaranya



masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai koordinator dan wakil koordinator. Jumlah Pengurus Pelkat sebanyak 11 orang 11 orang yang terdiri atas 8 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Latar belakang pendidikan para pelayan meliputi 50% S1, selebihnya SMA dan S2. Kehadiran warga jemaat dalam kerja bakti rutin pada hari Sabtu, 04 Agustus 2018 sebanyak 20 orang, terdiri atas 12 orang perempuan dan 8 orang laki-laki yang meliputi PKP 8 orang, PKB 5 orang, PKLU 3 orang (L=1,P=2), PA 4 orang (L=2,P=2) dari jumlah warga 273 orang. Presentase kehadiran 7,3%; Pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018 sebanyak 15 orang, terdiri atas 9 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang meliputi PA 3 orang (L=2,P=1), PKP 6 orang, PKB 3 orang dan PKLU 3 orang (P=2,L=1). Presentase kehadiran 5,5%.

Kemudian pada langkah ketiga, dengan mencermati data umum pembuka wawasan maka teridentifikasi secara terpilah dari keempat faktor kesenjangan gender yang terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, ditemukan dua faktor kesenjangan gender yakni melalui data partisipasi dan data kontrol.

a.Data Partisipasi, terjadi kesenjangan karena jumlah kehadiran warga jemaat Sekpel IV, VII dan XI dalam kerja bakti kurang optimal dengan presentase dibawah 10% dari jumlah warga sekpel dan didominasi oleh perempuan (PKP). Selebihnya dari PKB, PKLU dan PA (tampa PT dan



b.Data Kontrol, terjadi kesenjangan pada jumlah Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang didominasi oleh laki-laki, sebaliknya pada Pengurus Pelkat Jemaat dan Sektoral didominasi oleh perempuan seperti yang terdapat pada Pelaksana Sektoral (Majelis dan Pengurus Pelkat) di Sekpel IV, VII dan XI.

Adapun penyebab kesenjangan secara internal yang digambarkan pada langkah keempat adalah karena tidak semua pelaksana maupun warga yang paham gender serta konsep keadilan dan kesetaraan gender. Sementara penelitian Makkarumpa (2017), menemukan bahwa penyebab kesenjangan secara internal adalah hanya pada pelaksana yang belum paham tentang konsep gender yang sebenarnya. Selain itu, sebagian besar Pelaksana belum memahami teknik penyusunan perencanaan kegiatan/program yang responsif gender, dsb.

Pada langkah kelima ditemukeni isu gender/ penyebab kesenjangan diluar lembaga (eksternal) seperti budaya patriaki yaitu perilaku masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pelengkap, menduduki peran lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, menganggap perempuan lemah dan tidak bisa menjadi pemimpin dsb. Fenomena ini terlihat dari kurangnya keterlibatan perempuan pada posisi pimpinan/pelaksana (PHMJ). Hal tersebut tentu membawa pengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan atau program jemaat termasuk

kerja bakti rutin yang melibatkan sekpel IV, VII, dan XI. Selain itu, *stereotype* atau pelebelan yang melanggengkan anggapan bahwa



perempuan lebih tepat untuk berperan membimbing dan mendidik anak-anak dan teruna/remaja dibandingkan laki-laki sehingga untuk peran pengurus pelkat jemaat maupun sektoral khususnya pelkat PA dan PT didominasi oleh perempuan. Sementara anggapan lainnya bahwa peran domestik seperti mengurus dan membersihkan rumah termasuk lingkungan gereja lebih tepat dilakukan oleh perempuan. Pemahaman atau anggapan tersebut bukan dapat memengaruhi pembentukan perilaku seseorang mulai dari rumah kemudian dibawa ke luar rumah termasuk di gereja. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya kehadiran warga jemaat dalam kegiatan kerja bakti, bahkan kehadiran didominasi oleh kaum perempuan.

Langkah keenam pada tahap II, disebutkan sebelumnya bahwa tujuan program kerja bakti rutin adalah meningkatkan rasa kepedulian, rasa memiliki, serta rasa tanggung jawab jemaat terhadap Gereja. Setelah melalui analisis pada tahap - tahap sebelumnya yakni analisis isu gender, maka tujuan program ini dapat direformulasi menjadi tujuan yang responsif gender yaitu “ **meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki serta tanggung jawab jemaat baik laki-laki maupun perempuan terhadap kebersihan lingkungan Gereja dan sekitarnya; memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas serta semangat gotong royong dikalangan jemaat laki-laki dan perempuan.**”



selanjutnya pada langkah ketujuh berdasarkan informasi dari faktor lingkungan gender diatas dapat dirumuskan kegiatan yang responsif

gender sebagai rekomendasi kepada Pelaksana GPIB Jemaat Bahtera Kasih baik tingkat Jemaat maupun Sektoral untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program kerja bakti rutin, antara lain:

1. Mengoptimalkan sosialisasi program kerja bakti melalui jaringan koordinasi antar pelaksana dan penggunaan media yang lebih bervariasi melalui kotbah, pembinaan, warta jemaat/ sektor/ pelkat dalam ibadah, media sosial serta media cetak warta jemaat, dls.
2. Mengoptimalkan teknis pelaksanaan kerja bakti melalui penjadwalan yang lebih bervariasi persekpel maupun perpelkat, dengan menggambarkan alternatif pembagian lokasi yang akan dikerjakan.
3. Menyosialisasikan pentingnya pemahaman konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam penatalayanan gereja, antara lain dalam penyusunan kegiatan/program yang responsif gender, termasuk dalam pelaksanaan program kerja bakti rutin yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.

Rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Makassar khususnya di Kelurahan Mappala untuk mengoptimalkan sosialisasi program “ Makassarta’ Tidak Rantasa” pada tiap elemen pendukung, termasuk pada lembaga gereja yang ada di wilayah Kelurahan Mappala, khususnya di GPIB Jemaat Bahtera Kasih.



langkah kedelapan pada tahap III (terakhir) ditetapkan data dasar
(ne) berdasarkan data pembuka wawasan adalah prosentase

kehadiran warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih sekpel IV, VII dan XI dalam kerja bakti rutin kurang optimal dibawah 10% dan didominasi oleh perempuan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa fenomena tersebut belum memenuhi standar dan kriteria proses implementasi program kerja bakti yang responsif gender dengan kehadiran yang idealnya lebih dari 10% dari jumlah warga persekpel dan melibatkan perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian pada langkah kesembilan tampak indikator *output* dari program kerja bakti rutin adalah bertambahnya jumlah prosentase kehadiran warga perempuan maupun laki-laki. Indikator *outcomenya* adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi program kerja bakti.



Tabel 4.6. Gender Analysis Pathway (GAP) GPIB Jemaat

Bahtera Kasih

Langkah 1	Lembaga Kegiatan Tujuan	GPIB Jemaat bahtera kasih Kerja Bakti Rutin Meningkatkan rasa kepedulian, rasa memiliki, serta rasa tanggung jawab jemaat terhadap Gereja
Langkah 2	Data Pembuka Wawasan	GPIB Jemaat Bahtera Kasih beralamat di Jalan Tidung X Nomor 18, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Makassar. Jumlah warga jemaat tahun 2017, 489 KK, 2713 jiwa yang terdiri atas laki-laki 1330 orang dan perempuan 1383 orang. Latar belakang pendidikan S1 keatas 60% dan Sosial 60% golongan menengah keatas. 1.GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilayani oleh : Majelis Jemaat (Pendeta, Penatua dan Diaken) sebanyak 144 orang, terdiri atas 72 orang laki-laki dan 72 orang perempuan, 11 orang diantaranya adalah sebagai Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) terdiri atas 3 orang perempuan dan 8 orang laki-laki, dan 24 orang sebagai Koordinator dan wakil Sektor Pelayanan terdiri atas 9 orang perempuan dan 15 orang laki-laki. Selain itu, Pengurus Pelkat sebanyak 158 orang terdiri atas laki-laki 49 orang dan perempuan 109 orang. a.Sektor Pelayanan IV: (1)Jumlah warga jemaat per tahun 2017 sebanyak 84 KK dan 297 jiwa, terdiri atas perempuan 160 perempuan dan 137 laki-laki dengan latar belakang pendidikan 40% S1, selebihnya S2, Diploma dan SMA. (2).Jumlah Majelis Jemaat sebanyak 11 orang terdiri atas 4 laki-laki dan 7 perempuan, 2 orang diantaranya masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai koordinator dan wakil koordinator. (3).Pengurus Pelkat sebanyak 13 orang terdiri atas 9 perempuan dan 4 laki-laki. 3.Latar belakang pendidikan 50% S1, selebihnya SMA dan Diploma . (4)Kehadiran pada kerja bakti rutin yaitu; Sabtu, 25 Maret 2018 sebanyak 5 orang(L=1 orang,P=4 orang) yang meliputi PKP=3 orang, PA=2 orang dari jumlah 297 orang (1,7%) dan Sabtu, 16 Juni 2018 sebanyak 15 orang (L=4 orang,P=11 orang) yang meliputi PKP dan PKB. Persentase 5,1%.



		<p>b. Jemaat Sektor Pelayanan VII</p> <p>(1)Jumlah warga jemaat per tahun 2017 sebanyak 50 KK dan 180 jiwa, terdiri atas laki-laki 80 orang dan perempuan 100 orang, dengan latar belakang pendidikan 60% S1, selebihnya SMA, S2 dan S3.</p> <p>(2)Jumlah Majelis Jemaat sebanyak 11 orang, terdiri atas 7 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, 2 orang diantaranya masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai koordinator dan wakil koordinator.</p> <p>(3)Jumlah Pengurus Pelkat sebanyak 13 orang terdiri atas 9 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.</p> <p>(4)Latar belakang pendidikan sekitar 60% S1 dan selebihnya SMA dan S2.</p> <p>(5).Partisipasi warga jemaat dalam kerja bakti yaitu; Sabtu, tanggal 22 April 2018 sebanyak 10 orang (L=4 orang,P=6orang) yang meliputi PKP=4 orang, PKB=2 orang, PKLU=4 orang dari jumlah180 orang (5,5%) dan Sabtu,07 Juli 2018 sebanyak 3 orang perempuan(PKP) dari jumlah 180 orang (1,7%).</p> <p>c. Jemaat Sektor Pelayanan XI</p> <p>(1)Jumlah warga jemaat per tahun 2017 sebanyak 81 KK, 273 jiwa yang terdiri atas 138 laki-laki dan 135 perempuan dengan latar belakang pendidikan S1 dan SMA.</p> <p>(2)Jumlah Majelis Jemaat sebanyak 14 orang, terdiri atas 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, 2 orang diantaranya laki-laki dan perempuan sebagai koordinator dan wakil koordinator sektor.</p> <p>(3)Jumlah pengurus pelkat sebanyak 11 orang terdiri atas 8 orang perempuan dan 3 orang laki-laki.</p> <p>(4)Latar belakang pendidikan baik majelis maupun pelkat 50% S1, selebihnya SMA dan S2.</p> <p>(5)Partisipasi warga dalam Kerja Bakti yaitu; Sabtu, tanggal 04 Agustus 2018 sebanyak 20 orang (P=12, L=8) yang meliputi PKP=8 orang, PKB=6 orang, PKLU=3 orang, PA=4 orang dari jumlah warga 273 orang (7,3%) dan Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018 sebanyak 15 orang (P=9,L=6) yang meliputi PA=3 orang, PKP=6 orang, PKB=3 orang, PKLU=3 orang dari jumlah warga 273 Orang (5,5%).</p>
--	--	--



Langkah 3	Isu Gender	Faktor Kesenjangan	<p>a.Partisipasi, terjadi kesenjangan karena persentase kehadiran warga jemaat sekpel IV,VII dan XI dalam kerja bakti dibawah 10% dan didominasi oleh perempuan (PKP).</p> <p>b.Kontrol, terjadi kesenjangan pada jumlah Pelaksana Harian Majelis Jemaat(PHMJ) yang didominasi oleh laki-laki, sebaliknya pada Pengurus Pelkat Jemaat dan Sektoral didominasi oleh perempuan seperti yang terdapat pada pelaksana sektor (Majelis dan Pengurus Pelkat) di sekpel IV,VII dan XI.</p>
Langkah 4		Sebab Kesenjangan Internal	Tidak semua pelaksana maupun warga jemaat yang paham gender serta konsep keadilan dan kesetaraan gender. Pelaksana belum memahami teknik penyusunan perencanaan kegiatan/program yang responsif gender.
Langkah 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	Budaya patriaki memengaruhi kurangnya keterlibatan perempuan pada posisi pimpinan/ pelaksana (PHMJ) sehingga dapat berdampak pada kebijakan dan keputusan yang dihasilkan kurang berpihak pada perempuan. Hal tersebut tentu membawa pengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan atau program jemaat termasuk program kerja bakti rutin. Selain itu <i>gender streatype atau pelebelan</i> memengaruhi pengurus Pelkat Anak dan Teruna didominasi oleh perempuan karena dianggap perempuan lebih tepat berperan membimbing anak dan remaja dibandingkan dengan laki-laki. Pelebelan yang menganggap perempuan lebih tepat menjalankan peran domestik yakni membersihkan rumah atau lingkungan gereja menjadi salah satu faktor penyebab kurang optimalnya kehadiran warga jemaat dalam kegiatan kerja bakti, bahkan didominasi oleh perempuan.
Langkah 6	Kejaksanaan dan Rencana Aksi	Reformulasi tujuan	<p>-Meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki serta tanggung jawab jemaat baik laki-laki maupun perempuan terhadap kebersihan lingkungan Gereja dan sekitarnya.</p> <p>-Memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas serta semangat gotong royong dikalangan jemaat laki-laki dan perempuan.</p>
		Rencana Aksi	Rekomendasi yang ditujukan kepada pelaksana tingkat Jemaat dan sektoral/pelkat untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program kerja bakti yakni:



Langkah 7			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sosialisasi program kerja bakti melalui jaringan koordinasi antar pelaksana, penggunaan media yang lebih bervariasi melalui kotbah, pembinaan, medsos, media cetak warta jemaat serta warta jemaat yang diumumkan dalam ibadah Minggu, sektor dan pelkat, dsb. 2. Mengoptimalkan teknis pelaksanaan kerja bakti melalui penjadwalan yang lebih bervariasi persektor maupun perpelkat dengan menggambarkan alternatif pembagian lokasi yang akan dikerjakan. 3. Menyosialisasikan tentang pentingnya pemahaman konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam penatalayanan gereja, antara lain dalam penyusunan kegiatan/ program yang responsif gender, termasuk dalam pelaksanaan kerja bakti rutin yang melibatkan warga jemaat laki dan perempuan secara adil dan setara. Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Mappala memberikan sosialisasi secara kontinu tentang program “MTR” kepada masyarakat termasuk lembaga keagamaan dalam hal ini GPIB Jemaat Bahtera Kasih.
Langkah 8	Pengukuran Hasil	Data dasar	Presentase kehadiran warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih (sekel IV,VII dan XI) dalam kerja bakti rutin dibawah 10%
Langkah 9		Indikat or gender	<p>Output. Presentase jumlah kehadiran warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih (sekel IV,VII dan XI) baik laki-laki maupun perempuan meningkat.</p> <p>Outcome: Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi program kerja bakti rutin.</p>



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) adalah bagian dari lembaga keagamaan yang terpanggil memenuhi amanat-Nya dalam memelihara dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup dan mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan Visi dan Misi GPIB, yakni dengan menerapkan program “Makassarta’ Tidak Rantasa” melalui beberapa kegiatan khususnya “Kerja Bakti Rutin”.
2. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi program kerja bakti, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya program kerja bakti sudah berjalan baik karena didukung oleh sumber daya yang potensial dari semua unsur baik pelaksana maupun warga jemaat GPIB Bahtera Kasih. Meskipun perlu diakui masih ada kekurangan yang memengaruhi keterlibatan jemaat dalam pelaksanaan kerja bakti akibat dari faktor birokrasi yakni kordinasi dan pembagian tugas antar pelaksana yang belum optimal. Selain itu dimensi budaya bersih (tidak rantasa) dan sosial



yang menganggap bahwa urusan kebersihan gereja adalah urusan koster gereja atau petugas kebersihan juga turut memengaruhi kurang optimalnya kehadiran warga jemaat dalam kerja bakti rutin.

3. Berdasarkan analisis kesenjangan gender pada implementasi program kerja bakti rutin, maka dapat dikatakan bahwa proses implementasi sudah terlaksana dengan baik karena didukung oleh sumberdaya warga jemaat baik laki-laki dan perempuan yang potensial dalam perannya sebagai pelaksana yakni PHMJ, Majelis Jemaat, Pengurus Pelkat Jemaat dan Sektor. Namun, diakui masih terdapat kekurangan yakni adanya kesenjangan gender dalam posisi PHMJ yang didominasi oleh laki-laki, sebaliknya dalam posisi Pengurus Pelkat Anak dan Teruna justru didominasi oleh perempuan. Selain itu juga tampak partisipasi warga dalam program kerja bakti rutin yang kurang optimal dengan persentasi dibawah 10%, justru didominasi oleh perempuan.

Hal ini disebabkan karena tidak semua warga jemaat maupun pelaksana yang paham gender serta konsep keadilan dan kesetaraan gender, bahkan pelaksana belum sepenuhnya memahami teknik penyusunan perencanaan kegiatan/ program yang responsif gender. Selain itu, budaya patriaki dan *gender streotype* juga melanggengkan anggapan bahwa perempuan

bagai pelengkap dan tidak bisa menjadi pemimpin, serta lebelan untuk tugas mengurus anak/ teruna adalah urusan



perempuan dan untuk membersihkan rumah termasuk lingkungan gereja adalah urusan perempuan.

2. Saran

1. Pelaksana Harian Jemaat Majelis Jemaat (PHMJ) GPIB Bahtera Kasih dan semua pihak terkait mengoptimalkan sosialisasi program kerja bakti melalui jaringan kordinasi antar pelaksana dan penggunaan media yang lebih bervariasi.
2. PHMJ GPIB Jemaat Bahtera Kasih dan semua pihak terkait lebih mengoptimalkan teknis pelaksanaan kerja bakti melalui penjadwalan yang lebih bervariasi persektor maupun perpelkat disertai petunjuk yang jelas tentang peta wilayah lokasi kerja bakti.
3. PHMJ GPIB Jemaat Bahtera Kasih dan semua pihak terkait lebih menyosialisasikan tentang pentingnya konsep gender serta keadilan dan kesetaraan gender dalam penatalayanan gereja yakni keseimbangan laki-laki dan perempuan (sesuai dengan potensi yang dimiliki) dalam posisi kepemimpinan pada PHMJ maupun Pengurus Pelkat khususnya Pelkat Anak dan Teruna, serta dalam penyusunan kegiatan/program yang responsif gender termasuk dalam pelaksanaan kerja bakti rutin yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.



4. Rekomendasi kepada Pemerintah, khususnya Kelurahan Mappala untuk memberikan sosialisasi secara kontinu tentang program “MTR” kepada masyarakat termasuk lembaga keagamaan dalam hal ini GPIB Jemaat Bahtera Kasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*,(Online), Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.1, Makassar: Universitas Negeri Makassar. (https://www.researchgate.net/publication/277844111_Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana, diakses 25 Mei 2018).
- Alamsyah, A., Damis, R., dan Hamsyah, H.B. 2017. *Dukungan Organisasi Islam "Wahdah Islamiyah" Terhadap Program Makassar' Tidak Rantasa*, (Online), Sulesan Vol.II No. 1 Tahun 2017. (<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/3546/3294>, diakses 18 Januari 2018).
- Andhika, R.A.R., dan Agung, T.E.P. 2016. *Pengaruh Paparan CH4 Dan H2S Terhadap Keluhan Gangguan Pernapasan Pemulung Di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo*. Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health (online) Vol. 1, No.1, Oktober 2016 ([http://dx.doi.org/10.21111/jihoh.v1i1.603.\(file:///C:/Users/Asus/Downloads/79-22-PB.pdf](http://dx.doi.org/10.21111/jihoh.v1i1.603.(file:///C:/Users/Asus/Downloads/79-22-PB.pdf), diakses 5 Juni 2018).
- Badudu, J. S., dan Zain, S.M. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bainar. 1998. *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Dewanti Ni Nyoman, S.R., 2008. *Analisis Persepsi Dan Sikap Terhadap Peran Gender Pada Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, (Online). Skripsi Sarjana Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. (<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2581/A08nns.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses 28 Mei 2018).
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



MF. A.W. 2012. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*, (Online), tesis Magister Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Ponegoro Semarang.

(http://eprints.undip.ac.id/37861/1/tesis_Anita.pdf, diakses 30 Juni 2018).

Handayani, T., dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press.

Hardianti, Wildam, A.M.F.A., dan Nasrulhaq. 2017. *Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassar Tidak Rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar, (Online)*, Jakarta Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. (<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/422>, diakses 17 Juli 2018).

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hutabarat, Fryne., Ottay, R.I., dan Siagian, Iyone. (2015). *Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Padat Di Kelurahan Malalayang II Kecamatan Malalayang Kota Manado, (Online)*, Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik : Volume 3 Nomor 1 Februari 2015. (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=gambaran+perilaku+masyarakat+terhadap+pengelolaan+smapah+padat+di+kelurahan+malalayang&btnG=, diakses 16 Maret 2018).

Illich, Ivan. 2007. *Matinya Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Isma, P. I. 2018. *Keterpenuhan Penerapan Prasyarat Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana Unhas.

Karim, Khalil Abdul.1997. *Relasi Gender : Pada masa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khaedir, Muh., dan Sangkala, Ibsik. 2016. *Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, (Online)*, Universitas Negeri Makassar. (<file:///C:/Users/Asus/Downloads/2976-7175-1-PB.pdf>, diakses 18 Januari 2018).

Lembaga Alkitab Indonesia. 2008. *ALKITAB*. Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia.

Lestari, Vina Rizki. (2014). *Implementasi Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) (Studi Kasus Di Puskesmas Jetis Yogyakarta), (Online)*, Jurnali Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan) UGM, Yogyakarta. ([file:///C:/Users/Asus/Downloads/S1-2014-281007-Chapter1%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/S1-2014-281007-Chapter1%20(5).pdf), diakses 18 Januari 2018).



Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih. 2018. *Program Kerja dan Anggaran Belanja Tahun Pelayanan 2018-2019*. Makassar : Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih.

Majelis Sinode GPIB. 2015. *BUKU I: PEMAHAMAN IMAN dan AKTA GEREJA*. Jakarta: Penerbitan GPIB.

Majelis Sinode GPIB. 2015. *BUKU III : PKUPPG dan GRAND DESIGN PPSDI*. Jakarta: Penerbitan GPIB.

Majelis Sinode GPIB. 2015. *BUKU IV : TATA GEREJA : PKUPPG dan GRAND DESIGN PPSDI*. Jakarta: Penerbitan GPIB.

Makarao, Nurul Ramadhani. 2009. *Gender dalam Bidang Kesehatan*. Bandung : Alfa Beta.

Megawangi, R. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Relasi Gender*. Bandung: Mizan Pustaka.

Moleong, L.J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muthali'in. 2010. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Ngelow, Zakaria J., dan Lady P.R. Mandalika. (eds). 2015. *Teologi Tanah Perpektif : Perpektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*. Makassar : Yayasan Oase Intim.

Nugroho, Riant. 2008. *Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, A. 2017. *Komunitas Muda Urban Mengelola Sampah: Kajian Partisipatoris Gerakan Peduli Sampah Nasional di Kota Yogyakarta (Online)*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 4 No. 1, Januari 2017. (<https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23633/15550>, diakses 5 Juni 2018).

Nur, N. A. W. 2015. *Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Nurhaeni, I. D. A. 2009. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta : UNS.

I., Maharani, D.P., dan Irwan, A.L. 2014. *Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa, (Online)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7, Nomor 1, Januari 2014 (63-74).



http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/viewFile/1257/pdf_1, diakses 17 Juli 2018)

Pandu, Maria. 2010. *Kesetaraan dan Keadilan Gender Nilai Hakiki Kehidupan Masyarakat Beradab*. Pidato Upacara Penerimaan Guru Besar dalam Bidang Sosilogi Gender pada 22 Juli 2010 di Universitas Hasanuddin, Makassar

_____ 1990. *Matrifokalitas Di Masyarakat Pedesaan* (Kasus Pada Masyarakat Nelayan Mandar, Kabupaten Pirang, Sulsel) Tesis Magister.

Pasullean, Benyamin. 2014. *Sejarah Berdirinya Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar*.

Rochmayanto, Y., dan Kurniasih, P. *Peranan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan di Kabupaten Solok Sumatera Barat*, (Online), Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 10 No.3, Desember 2013. (<https://media.neliti.com/media/publications/29216-ID-peranan-gender-dalam-adaptasi-perubahan-iklim-pada-ekosistem-pegunungan-di-kabup.pdf>, diakses 24 Maret 2018).

Sari, B. W. Nilla. 2014. *Analisis Gender Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dalam Kelurahan Siaga, (Studi Kasus Kelurahan Siaga Kalibening di Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*, (Online), Tesis Magister. (<http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5160>, diakses 13 Maret 2018)

Subarsono, Agustinus. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Sutopo, A.H., Adrianus rief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta :Primedia Group

Towoloe, Sherly. 2018. *Perception Of Community On The Local Government Failure Factors On Sustainable Solid Waste Management In A Developing Country*. Disertasi. Malaysia: Faculty Of Built Enviroment Universiti Teknologi.

Undang Nomor 18 Tahun 2008. *Tentang Pengelolaan Sampah*, (online), (<https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf>, diakses 24 Maret 2018).



- Wahab, H.S.A. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, Hesti. 1991. *Idiologi Gender* Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Studi Wanita. Jakarta: Pusat Studi Wanita, UI.
- Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan*. Tesis Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang. http://eprints.undip.ac.id/16932/1/DARU_WISAKTI.pdf, diakses 13 Maret 2018.



LAMPIRAN



PANDUAN DALAM WAWANCARA

1. Apa latar belakang dari program “MTR” yang diterapkan pada jemaat dan bagaimana pelaksanaan “MTR”?
2. Apakah informasi “MTR” sudah disampaikan dengan jelas kepada jemaat?
3. Apakah media yang dipakai sebagai sarana untuk menyosialisasikan kepada Jemaat saat ini sudah efektif?
4. Hal-hal apa saja yang mendukung kemampuan sumberdaya manusia (pelaksana) dalam menyukseskan “MTR”?
5. Fasilitas-fasilitas apa saja yang mendukung kegiatan “MTR”?
6. Bagaimana pemahaman Anda tentang tujuan “MTR” apakah relevan dengan Visi dan Misi GPIB?
7. Apakah Anda setuju dengan maksud dan tujuan program “MTR” diterapkan di lingkungan jemaat?
8. Apakah kordinasi antar pelaksana program sudah berjalan dengan baik?
9. Bagaimana pembagian tugas yang diterapkan antar para pelaksana dalam melaksanakan program “MTR”?
10. Menurut Anda apakah faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan “MTR” ini?
11. Apakah Anda pernah mendengar istilah isu kesetaraan dan keadilan





Foto Kegiatan Kerja Bakti Rutin



Foto Wawancara dengan Koordinator dan warga sektor pelayanan VII



Foto Wawancara dengan Ketua PELKAT Gerakan Pemuda (GP) Jemaat





Foto Wawancara dengan Petugas
Kebersihan



Foto Wawancara dengan Ketua PELKAT
Persatuan Kaum Perempuan (PKP) Jemaat



Foto Wawancara dengan Ketua II
Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ)

